



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SEMESTER I



UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juli 2026

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ix
RINGKASAN	1
LAPORAN KEUANGAN	4
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. PENJELASAN UMUM	9
A.1. DASAR HUKUM	9
A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	9
A.3. RENCANA STRATEGIS	12
A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	16
A.5. BASIS AKUNTANSI	16
A.6. DASAR PENGUKURAN	17
A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	24
B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	25
B.2. BELANJA NEGARA	26
B.2.1. BELANJA PEGAWAI	28
B.2.2. BELANJA BARANG	29
B.2.3. BELANJA MODAL	30
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	32
C.1. ASET LANCAR	32
C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	32
C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	32
C.1.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA	33
C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK	33
C.1.5. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK	33

C.1.6. PERSEDIAAN	34
C.2.ASET TETAP	34
C.2.1. PERALATAN DAN MESIN	35
C.2.2. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	37
C.2.3. ASET TETAP LAINNYA	37
C.2.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	38
C.3.ASET LAINNYA	38
C.3.1. ASET TAK BERWUJUD	39
C.3.2. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	39
C.3.3. ASET LAIN-LAIN	40
C.3.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	40
C.4.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	41
C.4.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	41
C.4.2. UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN	42
C.4.3. UANG MUKA DARI KPPN	42
C.4.4. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	42
C.5.EKUITAS	43
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	44
D.1.PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	44
D.2.BEBAN PEGAWAI	44
D.3.BEBAN PERSEDIAAN	45
D.4.BEBAN BARANG DAN JASA	46
D.5.BEBAN PEMELIHARAAN	46
D.6.BEBAN PERJALANAN DINAS	47
D.7.BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	47
D.8.BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	48
D.9.KEGIATAN NON OPERASIONAL	48
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	50
E.1.EKUITAS AWAL	50
E.2.SURPLUS (DEFISIT) LO	50
E.3.DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	50
E.4.KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS	50
E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	50
E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	51
E.5.2. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG	51
E.6.EKUITAS AKHIR	52
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	53

F.1. REKENING PEMERINTAH	53
F.2. PENGUNGKAPAN ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET, DAN REALISASI RINCIAN OUTPUT BERDASARKAN FUNGSI APBN DAN PRIORITAS NASIONAL SEMESTER I TAHUN 2026	53
F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	55
F.3.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA	55
F.3.2. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN	55
F.3.3. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI	56
F.3.4. TRANSAKSI RESIPROKAL	56
F.3.5. INFORMASI TUNTUTAN HUKUM	57
LAMPIRAN PENDUKUNG	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	2
Tabel 3 Kualitas Piutang	19
Tabel 4 Masa Manfaat Aset Tetap	21
Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	22
Tabel 6 Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2026	24
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2026	25
Tabel 8 Perbandingan Rincian Realisasi PNBPN 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	25
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2026	26
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2026	27
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	28
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	29
Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	30
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	31
Tabel 15 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	32
Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	33
Tabel 17 Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	33
Tabel 18 Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	34
Tabel 19 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	35
Tabel 20 Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin	35
Tabel 21 Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin	36
Tabel 22 Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin	36
Tabel 23 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya	37
Tabel 24 Mutasi Tambah Saldo Aset Tetap Lainnya	37
Tabel 25 Mutasi Kurang Saldo Aset Tetap Lainnya	38
Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026	38
Tabel 27 Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	39
Tabel 28 Rincian Transaksi Aset tak Berwujud per 30 Juni 2026	39
Tabel 29 Rincian Aset Lain-Lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	40
Tabel 30 Mutasi Aset Lain-Lain	40
Tabel 31 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2026	41
Tabel 32 Rincian Utang Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025	41
Tabel 33 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026	42

Tabel 34 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025	43
Tabel 35 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	44
Tabel 36 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	45
Tabel 37 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	45
Tabel 38 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	46
Tabel 39 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	47
Tabel 40 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	47
Tabel 41 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	48
Tabel 42 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	48
Tabel 43 Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	49
Tabel 44 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas	51
Tabel 45 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	51
Tabel 46 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	51
Tabel 47 Rincian Pengesahan Hibah	52
Tabel 48 Transaksi Resiprokal	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Risalah Lelang
Lampiran II	Daftar Saldo Rekening per 30 Juni 2026
Lampiran III	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran IV	Neraca
Lampiran V	Laporan Operasional
Lampiran VI	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran VII	Barang Milik Negara
Lampiran VIII	Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Intrakomptabel
Lampiran IX	Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Ekstrakomptabel
Lampiran X	Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Aset Tak Berwujud
Lampiran XI	Rincian Persediaan Menurut Unit Kerja per 30 Juni 2026
Lampiran XII	Monitoring dan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian s.d. 30 Juni 2026
Lampiran XIII	Capaian Rincian Output
Lampiran XIV	Capaian Output Program Prioritas Nasional



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Juli 2026
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Semester I Tahun Anggaran 2026 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2026, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Juli 2026
Inspektur


Mirza S. Mashudi

RINGKASAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode Tahun Anggaran 2026 Semester I ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2026 berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp189.605.820,00. Sementara itu, Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp210.396.870.430,00 atau mencapai 45,84% dari alokasi anggaran sebesar Rp459.022.228.000,00. Dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2025, realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami peningkatan, baik dari sisi nilai maupun persentase penyerapan anggaran, yaitu dari 32,94% menjadi 45,84%.

Ringkasan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2026 dan Semester I Tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Tahun 2026			Tahun 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Negara dan Hibah	-	189.605.820	-	-	756.379.178	-
2	Belanja Negara	459.022.228.000	210.396.870.430	45,84%	459.766.254.000	151.459.917.336	32,94%

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per tanggal pelaporan. Nilai Aset per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp36.992.396.105,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.702.958.716,00, Aset Tetap sebesar Rp25.259.144.294,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp7.030.293.095,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp21.983.394.907,00 dan Rp15.009.001.198,00.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2026 dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	30-Jun-26 (Rp)	31-Dec-25 (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar	4.702.958.716	1.451.085.672	3.251.873.044	224,10%
Aset Tetap	25.259.144.294	22.419.090.891	2.840.053.403	12,67%
Aset Lainnya	7.030.293.095	10.382.253.870	-3.351.960.775	(32,29%)
Jumlah Aset	36.992.396.105	34.252.430.433	2.739.965.672	8,00%
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	21.983.394.907	10.521.347.672	11.462.047.235	108,94%
Ekuitas			0	
Ekuitas	15.009.001.198	23.731.082.761	-8.722.081.563	(36,75%)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	36.992.396.105	34.252.430.433	2.739.965.672	8,00%

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp219.069.963.667,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp219.069.963.667,00. Terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp139.390.535,00. Sedangkan untuk Pos-Pos Luar Biasa bersaldo nihil, sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp218.930.573.132,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 adalah sebesar Rp23.731.082.761,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp218.930.573.132,00, ditambah koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp1.226.959,00, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp210.207.264.610,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp15.009.001.198,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN KEUANGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

URAIAN	CATATAN	30-Jun-26		% thd Angg	30-Jun-25
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	189.605.820	-	756.379.178
JUMLAH PENDAPATAN		-	189.605.820	-	756.379.178
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	166.458.478.000	89.521.715.967	53,78%	71.621.812.374
Belanja Barang	B.2.2	283.372.877.000	112.545.298.607	39,72%	76.211.036.088
Belanja Modal	B.2.3	9.190.873.000	8.329.855.856	90,63%	3.627.068.874
JUMLAH BELANJA		459.022.228.000	210.396.870.430	45,84%	151.459.917.336

- Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp210.396.870.430,00 atau 45,84% dari total pagu anggaran sebesar Rp459.022.228.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja.
- Sedangkan realisasi belanja per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp151.459.917.336,00 atau 32,94% dari pagu anggaran sebesar Rp459.766.254.000,00.

Jakarta, Juli 2026
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto

II. NERACA

NERACA PER 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

URAIAN	CATATAN	30-Jun-26 (Rp)	31-Dec-25 (Rp)
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	1.799.906.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	2.114.316.717	504.857.652
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3	-	399.889.573
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	17.274.136
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.5	-	(86.371)
Persediaan	C.1.6	788.735.999	529.150.682
JUMLAH ASET LANCAR		4.702.958.716	1.451.085.672
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	112.648.413.823	104.486.189.611
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.2	2.231.461.587	2.231.461.587
Aset Tetap Lainnya	C.2.3	266.631.000	266.631.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.4	(89.887.362.116)	(84.565.191.307)
JUMLAH ASET TETAP		25.259.144.294	22.419.090.891
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	9.779.654.795	9.779.654.795
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	-	3.267.868.275
Aset Lain-Lain	C.3.3	3.691.088.090	3.691.088.090
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	(6.440.449.790)	(6.356.357.290)
JUMLAH ASET LAINNYA		7.030.293.095	10.382.253.870
JUMLAH ASET		36.992.396.105	34.252.430.433
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	15.820.007.813	10.018.902.520
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	4.355.430.563	-
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	1.799.906.000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.4	8.050.531	502.445.152
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		21.983.394.907	10.521.347.672
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5	15.009.001.198	23.731.082.761
JUMLAH EKUITAS		15.009.001.198	23.731.082.761
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		36.992.396.105	34.252.430.433

Jakarta, Juli 2026
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

URAIAN	CATATAN	30-Jun-26 (Rp)	30-Jun-25 (Rp)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNPB	D.1	-	209.400
JUMLAH PENDAPATAN		-	209.400
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	93.804.162.411	75.411.964.260
Beban Persediaan	D.3	1.092.353.677	768.886.439
Beban Barang dan Jasa	D.4	70.425.941.123	128.125.632.400
Beban Pemeliharaan	D.5	5.743.044.875	1.666.452.800
Beban Perjalanan Dinas	D.6	42.430.652.999	12.045.236.296
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	5.573.894.953	5.513.272.593
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(86.371)	(20.321)
Beban Lain-Lain		-	-
JUMLAH BEBAN		219.069.963.667	223.531.424.467
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(219.069.963.667)	(223.531.215.067)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		7.680.000	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		131.710.535	215.415.295
Jumlah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		139.390.535	215.415.295
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(218.930.573.132)	(223.315.799.772)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(218.930.573.132)	(223.315.799.772)

Jakarta, Juli 2026

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

URAIAN	CATATAN	30-Jun-26 (Rp)	30-Jun-25 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
EKUITAS AWAL	E.1	23.731.082.761	30.357.872.400	(6.626.789.639)	(21,83)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(218.930.573.132)	(223.315.799.772)	4.385.226.640	(1,96)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	1.226.959	-	1.226.959	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		-	-	-	-
Koreksi Lain-Lain		1.226.959	-	1.226.959	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	210.207.264.610	206.909.055.804	3.298.208.806	1,59
KENAIKAN PENURUAN EKUITAS		(8.722.081.563)	(16.406.743.968)	7.684.662.405	(46,84)
EKUITAS AKHIR	E.6	15.009.001.198	13.951.128.432	1.057.872.766	7,58

Jakarta, Juli 2026
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum Entitas

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Profil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Oktober 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN). Seiring dengan pergantian Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah. Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

Pada tahun 2024 terdapat pergantian kabinet yang baru dan menyebabkan perubahan pada struktur kelembagaan pemerintah pusat. Proses penataan organisasi pun dilakukan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menyesuaikan rekomendasi restrukturisasi organisasi, berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatur peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda Pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan di bidang perekonomian;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
- g. penyelesaian permasalahan di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang

terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian; dan

- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Pariwisata; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

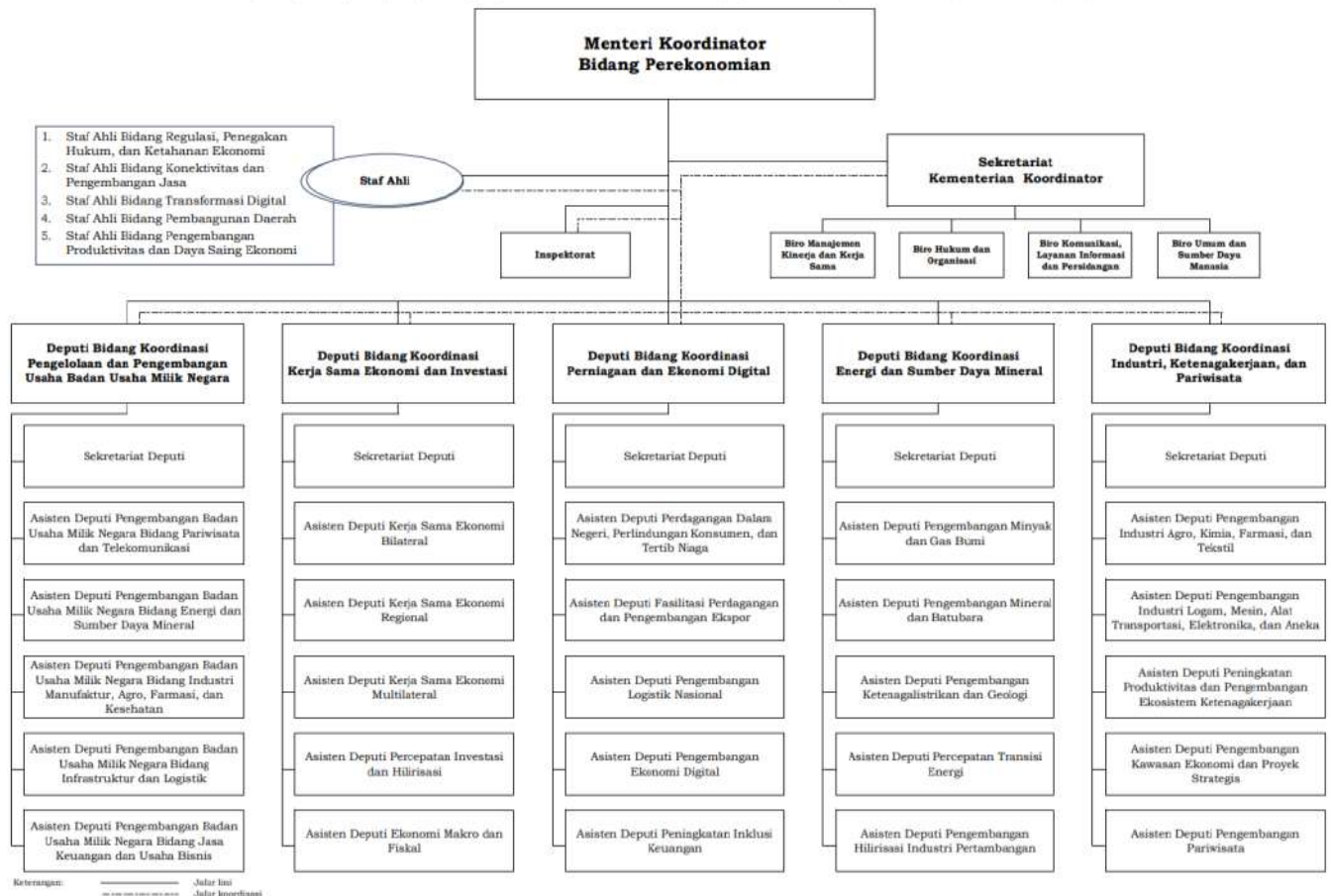
Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 sesuai hal tersebut di atas, maka diperlukan turunan peraturan dimaksud untuk mengatur kelembagaan internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini terwujud dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan tanggal 26 November 2024. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur struktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara;
- c. Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;
- d. Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital;
- e. Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
- g. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi;
- h. Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa;
- i. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital;
- j. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan

k. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.

Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A.3. RENCANA STRATEGIS

*Rencana
Strategis*

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2025-2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas**”. Mengacu pada visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan visi Kementerian sebagai berikut.

“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang maju diperlukan dukungan dari perekonomian yang memiliki daya saing tinggi, produktivitas yang meningkat, serta mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Koordinasi kebijakan yang efektif menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan saling mendukung, selaras, dan terarah dalam mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat. Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2025 - 2029.

Visi Presiden-Wakil Presiden 2025-2029 tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Presiden-Wakil Presiden yang meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan Misi Kementerian sebagai berikut:

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke 2,3,4,5,6 dan 7 sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Inisiatif dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian dalam rangka:

- 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan;**
- 2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Adaptif dan Akuntabel.**

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dicapai melalui Misi/Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Koordinator Kementerian Teknis di bidang perekonomian dalam mewujudkan 4 (empat) sasaran pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan daya saing ekonomi.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dari visi, misi, dan tujuan diatas terdapat kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diantaranya:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan;

2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan;

3. Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan	- Pertumbuhan Ekonomi (%) - Kontribusi PDB Maritim (%) - Kontribusi PDB Manufaktur (%) (%) GNI Per Kapita (USD)	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	- Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) - Besaran Pembentukan Modal Tetap Bruto - Proporsi PDB dari sektor industri pengolahan - Proporsi PDB dari sektor pariwisata (%) - Pemasukan devisa dari pariwisata (%) - Rasio biaya logistik terhadap PDB (%) - Indeks Daya Saing Digital pada level global - Indeks Ketahanan Energi
		Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi	Tingkat Inflasi (%)
Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan	Rasio Gini	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran	- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%) - Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel	Indeks Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	- Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian - Indeks Kepuasan Stakeholders dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian
		Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk tingkat pelaporan Eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Untuk periode pelaporan di tahun anggaran 2025, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua satuan kerja, yaitu Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit pelaporan tingkat Eselon I pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

*Basis
Akuntansi*

A.5. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber

daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3) Belanja

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek sesuai dengan yang diatur di PMK Nomor 69/PMK/06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO), apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyusutan Aset Tetap

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi

amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i>	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran*

Kemenko Bidang Perekonomian memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp459.022.228.000,00. Sampai Semester I 2026, dilakukan revisi atas DIPA Awal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Berikut ini adalah perubahan revisi terkait dengan pagu anggaran Kemenko Bidang Perekonomian:

Tabel 6
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2026

Uraian	2026	
	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	131.073.671.000	166.458.478.000
Belanja Barang	343.920.774.000	283.372.877.000
Belanja Modal	10.220.000.000	9.190.873.000
Jumlah Belanja	485.214.445.000	459.022.228.000

Revisi tersebut antara lain berupa penambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp35.384.807.000,00, pengurangan pagu belanja barang sebesar Rp60.547.897.000,00, dan pengurangan belanja modal sebesar Rp1.029.127.000,00.

Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp189.605.820

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp189.605.820,00. Tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2026 sehingga persentase realisasi terhadap estimasi pendapatan tidak dapat dihitung. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pendapatan penjualan aset serta penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu. Rincian realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2026

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	7.680.000	-
2	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	-	18.745.367	-
3	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	163.180.453	-
Jumlah		-	189.605.820	-

Realisasi PNBP per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp566.773.358,00 atau 74,93% dibandingkan realisasi PNBP pada 30 Juni 2025. Perbandingan realisasi PNBP disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8
Perbandingan Rincian Realisasi PNBP
30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

No	Uraian	30-Jun	30-Jun	Kenaikan (Penurunan)	
		TA 2026	TA 2025		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	7.680.000	-	7.680.000	0
2	Pendapatan dan Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	76.800.000	(76.800.000)	(100,00%)
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	209.400	(209.400)	(100,00%)
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	18.745.367	3.191.705	15.553.662	487,32%
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	163.180.453	676.178.073	(512.997.620)	(75,87%)
Jumlah		189.605.820	756.379.178	(566.773.358)	(74,93%)

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut

- 1) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan penerimaan atas lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 145/07.01/2026-01 tanggal 18 Juni 2026 sebesar Rp7.680.000,00 yang merupakan 1 (satu) paket BMN berupa Peralatan Mesin dan Meubelair terdiri dari PC, Printer, Meja, Kursi Besi, Lemari Besi, Mesin Jilid, dan Lensa Kamera. Informasi mengenai aset yang dilelang dapat dilihat di laporan pendukung pada Lampiran I;
- 2) Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL terdiri atas setoran kelebihan pembayaran belanja pegawai dan temuan auditor sebesar Rp18.745.367,00;
- 3) Penerimaan kembali belanja barang TAYL terdiri atas setoran kelebihan pembayaran perjadi, PPNN, penihilan RPATA, dan temuan auditor sebesar Rp163.180.453,00.

B.2. BELANJA NEGARA

*Realisasi Belanja
Negara
Rp210.396.870.430*

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp210.396.870.430,00 atau mencapai 45,84% dari alokasi anggaran sebesar Rp459.022.228.000,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi belanja dari transaksi kas, setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp122.573.521,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2026 berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2026

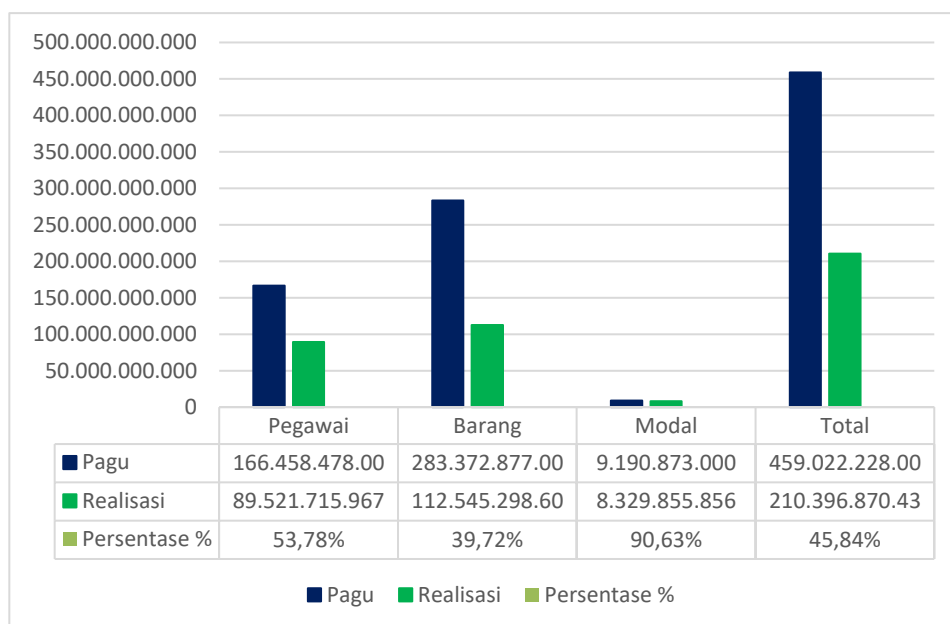
Kode Program	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	(%)	Pengembalian Belanja (Rp)
WA	Program Dukungan Manajemen	319.276.606.000	158.925.186.931	49,78%	84.351.626
CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	139.745.622.000	51.471.683.499	36,83%	38.221.895
Jumlah		459.022.228.000	210.396.870.430	45,84%	122.573.521

Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 30 Juni 2026 seluruhnya bersumber dari dana Rupiah Murni sebesar Rp210.396.870.430,00. Berdasarkan jenis belanja, rincian anggaran dan persentase realisasi terhadap anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	166.458.478.000	89.521.715.967	76.936.762.033	53,78%
52	Belanja Barang	283.372.877.000	112.545.298.607	170.827.578.393	39,72%
53	Belanja Modal	9.190.873.000	8.329.855.856	861.017.144	90,63%
Jumlah Belanja		459.022.228.000	210.396.870.430	248.625.357.570	45,84%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2026 Semester I dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Persentase realisasi atas jenis belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 30 Juni 2026 paling tinggi adalah Belanja Modal, yaitu sebesar 90,63% atau sebesar Rp8.329.855.856,00 dari pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp9.190.873.000,00. Adapun untuk Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar 53,78% atau senilai Rp89.521.715.967,00 dari pagu sebesar Rp166.458.478.000,00, sedangkan Belanja Barang telah terealisasi sebesar 39,72% atau sebesar Rp112.545.298.607,00 dari pagu sebesar Rp283.372.877.000,00. Secara keseluruhan, realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai Rp210.396.870.430,00 atau 45,84% dari total pagu belanja sebesar Rp459.022.228.000,00. Perbandingan realisasi belanja pada periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja	
		30-Jun TA 2025 (Rp)	30-Jun TA 2024 (Rp)
51	Belanja Pegawai	89.521.715.967	71.621.812.374
52	Belanja Barang	112.545.298.607	76.211.036.088
53	Belanja Modal	8.329.855.856	3.627.068.874
Jumlah		210.396.870.430	151.459.917.336

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai
Rp166.458.478.000

Pada periode anggaran sampai dengan 30 Juni 2026, pagu Belanja Pegawai sebesar Rp166.458.478.000,00 telah terealisasi sebesar Rp89.521.715.967,00 atau 53,83% dari pagu yang ditetapkan. Nominal pagu dan realisasi terbesar pada Belanja Pegawai terdapat pada akun Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp48.429.803.619,00 atau 54,91% dari pagu sebesar Rp88.225.889.000,00. Belanja tersebut digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai PNS di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Pegawai meningkat dari Rp71.621.812.374,00 pada 30 Juni 2025 menjadi Rp89.521.715.967,00 pada 30 Juni 2026 atau meningkat sebesar Rp17.899.903.593,00 (24,99%). Peningkatan realisasi Belanja Pegawai terutama dipengaruhi oleh meningkatnya belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertambahnya pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta meningkatnya realisasi pembayaran tunjangan kinerja pada tahun 2026. Adapun Pengembalian Belanja Pegawai pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp79.900.958,00 dan Rp16.008.275,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12
Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Kelompok Belanja	Uraian	30-Jun-26			Realisasi 30 Juni	Perbandingan Realisasi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tahun 2025 (Rp)	Naik (turun) (Rp)	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	38.447.159.000	20.878.397.692	54,30%	17.786.514.589	3.091.883.103	17,38%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	658.000	371.773	56,50%	273.427	98.346	35,97%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.668.193.000	1.153.256.564	69,13%	1.075.472.990	77.783.574	7,23%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	420.847.000	291.722.490	69,32%	280.286.182	11.436.308	4,08%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3.133.570.000	1.567.830.000	50,03%	1.622.770.000	(54.940.000)	(3,39%)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.095.029.000	2.459.425.676	48,27%	2.080.526.950	378.898.726	18,21%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	539.403.000	399.126.347	73,99%	396.096.193	3.030.154	0,77%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.767.757.000	946.746.660	53,56%	812.117.880	134.628.780	16,58%
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.487.954.000	1.967.497.000	43,84%	1.726.901.000	240.596.000	13,93%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	714.870.000	428.615.000	59,96%	239.929.550	188.685.450	78,64%
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	181.400.000	140.000.000	77,18%	122.500.000	17.500.000	14,29%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	7.229.088.000	3.903.931.348	54,00%	1.103.374.000	2.800.557.348	253,82%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	208.000	76.824	36,93%	23.090	53.734	232,72%
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	291.388.000	201.589.822	69,18%	35.604.480	165.985.342	466,19%
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	68.553.000	46.099.169	67,25%	6.937.584	39.161.585	564,48%
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	334.399.000	214.001.076	-	181.804.000	32.197.076	17,71%
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	291.055.000	199.251.560	68,46%	41.206.980	158.044.580	383,54%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	2.004.021.000	472.531.000	23,58%	131.975.000	340.556.000	258,05%
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	301.370.000	155.329.536	51,54%	-	155.329.536	0
512211	Belanja Uang Lembur	1.695.984.000	441.573.000	26,04%	225.979.000	215.594.000	95,40%
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	644.835.000	188.170.000	29,18%	3.867.000	184.303.000	4766,05%
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	88.225.889.000	48.429.803.619	54,89%	42.180.813.844	6.248.989.775	14,81%
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	8.914.848.000	5.036.369.811	56,49%	1.566.838.635	3.469.531.176	221,44%
Pengembalian Belanja Pegawai		-	(79.900.958)	-	(16.008.275)	(63.892.683)	399,12%
Jumlah Kelompok Belanja Pegawai		166.458.478.000	89.441.815.009	53,73%	71.605.804.099	17.836.010.910	24,91%

B.2.2. BELANJA BARANG

*Realisasi Belanja
Barang
Rp112.545.298.607*

Pada periode 30 Juni 2026, pagu Belanja Barang telah terealisasi sebesar 39,72% atau sebesar Rp112.545.298.607,00 dari pagu sebesar Rp283.372.877.000,00. Nominal pagu dan realisasi terbesar pada Belanja Barang adalah akun Belanja Sewa yang terealisasi sebesar Rp35.778.411.763,00 atau 61,22% dari pagu sebesar Rp58.441.156.000,00. Realisasi terbesar berikutnya adalah Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Luar Negeri yang terealisasi sebesar Rp17.528.109.472,00,00 atau 52,32% dari pagu sebesar Rp33.504.667.000,00. Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2026 dibandingkan dengan 30 Juni 2025, masing-masing adalah sebesar Rp112.545.298.607,00 dan Rp76.211.036.088,00. Dengan demikian, realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp36.334.262.519,00 atau 47,68% dibandingkan periode yang sama

pada tahun sebelumnya. Adapun Pengembalian Belanja Barang pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp42.672.563,00 dan Rp23.040.153,00. Dengan demikian, nilai pengembalian belanja meningkat sebesar Rp19.632.410,00 atau 85,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rincian Belanja Barang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13
Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 30 Juni 2026			Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Perbandingan Realisasi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Naik (turun) (Rp)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6.716.577.000	2.522.926.201	37,56%	2.681.045.843	(158.119.642)	(5,90%)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	26.224.000	714.300	2,72%	719.100	(4.800)	(0,67%)
521115	Belanja Honor Operasional Satker	1.008.580.000	333.667.889	33,08%	227.762.000	105.905.889	46,50%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4.791.362.000	2.307.548.428	48,16%	978.538.051	1.329.010.377	135,82%
521211	Belanja Bahan	13.764.332.000	3.863.585.340	28,07%	1.510.517.312	2.353.068.028	155,78%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	9.609.308.000	1.537.350.000	16,00%	132.560.000	1.404.790.000	1059,74%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.053.431.000	445.840.229	42,32%	75.964.000	369.876.229	486,91%
521252	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	48.850.000	2.630.700	5,39%	45.014.000	(42.383.300)	(94,16%)
521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	3.448.257.000	-	0,00%	-	-	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.880.932.000	1.237.494.991	31,89%	754.249.472	483.245.519	64,07%
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	340.000.000	62.804.388	18,47%	83.246.366	(20.441.978)	(24,56%)
522111	Belanja Langganan Listrik	6.333.430.000	2.167.357.304	34,22%	2.023.345.608	144.011.696	7,12%
522112	Belanja Langganan Telepon	75.000.000	22.382.979	29,84%	22.935.938	(552.959)	(2,41%)
522113	Belanja Langganan Air	180.000.000	58.187.185	32,33%	62.766.030	(4.578.845)	(7,30%)
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9.744.676.000	3.062.474.397	31,43%	2.731.837.914	330.636.483	12,10%
522131	Belanja Jasa Konsultan	9.427.767.000	1.158.257.984	12,29%	394.275.454	763.982.530	193,77%
522141	Belanja Sewa	58.441.156.000	35.778.411.763	61,22%	39.370.607.434	(3.592.195.671)	(9,12%)
522151	Belanja Jasa Profesi	5.841.109.000	758.200.000	12,98%	122.700.000	635.500.000	517,93%
522191	Belanja Jasa Lainnya	32.785.399.000	11.535.265.537	35,18%	15.973.427.598	(4.438.162.061)	(27,78%)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.900.000.000	3.488.196.139	59,12%	166.911.921	3.321.284.218	1989,84%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.235.854.000	1.551.004.257	36,62%	1.306.877.445	244.126.812	18,68%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.016.942.000	8.228.590.135	37,37%	1.814.314.668	6.414.275.467	353,54%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.977.078.000	525.073.170	26,56%	124.915.000	400.158.170	320,34%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.209.796.000	2.530.622.787	19,16%	1.067.463.000	1.463.159.787	137,07%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	24.719.384.000	11.881.275.595	48,06%	910.272.567	10.971.003.028	1205,24%
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	10.292.766.000	-	0,00%	3.382.373.499	(3.382.373.499)	(100,00%)
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	33.504.667.000	17.528.109.472	52,32%	269.436.021	17.258.673.451	6405,48%
Pengembalian Belanja Barang			(42.672.563)		(23.040.153)	(19.632.410)	85,21%
Jumlah Kelompok Belanja Barang		283.372.877.000	112.545.298.607	39,72%	76.211.036.088	36.334.262.519	47,68%

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal
Rp8.329.855.856

Pada periode 30 Juni 2026, pagu Belanja Modal telah terealisasi sebesar 90,63% atau sebesar Rp8.329.855.856,00 dari pagu sebesar Rp9.190.873.000,00. Seluruh pagu Belanja Modal pada periode ini berada pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.190.873.000,00, yang digunakan untuk mendukung pengadaan peralatan dan mesin dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan

fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Realisasi Belanja Modal pada kelompok tersebut mencapai Rp8.329.855.856,00 atau 90,63% dari pagu yang tersedia

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal pada periode 30 Juni 2025, terjadi peningkatan realisasi dari Rp3.627.068.874,00 menjadi Rp8.329.855.856,00, atau meningkat sebesar Rp4.702.786.982,00 (129,66%). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan aset tetap pada Semester I Tahun 2026 berjalan lebih optimal dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Rincian realisasi Belanja Modal disajikan pada Tabel 14:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Kelompok Belanja	Uraian	Realisasi 30 Juni 2026			Realisasi 30 Juni 2025 (Rp)	Perbandingan Realisasi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Naik (turun) (Rp)	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.190.873.000	8.329.855.856	90,63%	3.627.068.874	4.702.786.982	129,66%
Pengembalian Belanja Modal		-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		9.190.873.000	8.329.855.856	90,63%	3.722.878.524	4.606.977.332	123,75%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

Aset Lancar
Rp4.702.958.716

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp4.702.958.716,00 dan Rp1.451.085.672,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Aset Lancar	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.799.906.000	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	2.114.316.717	504.857.652
3	Belanja Dibayar Dimuka	-	399.889.573
4	Piutang Bukan Pajak	-	17.274.136
5	Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	-	(86.371)
6	Persediaan	788.735.999	529.150.682
Jumlah		4.702.958.716	1.451.085.672

C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp1.799.906.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 bersaldo sebesar Rp1.799.906.000,00 dan saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) per 30 Juni 2026 yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Bendahara
Lainnya dan
Setara Kas
Rp2.114.316.717

Kas Bendahara Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 bersaldo Rp2.114.316.717,00 dan Rp504.857.652,00. Kas lainnya setara kas per 30 Juni 2026 merupakan kas yang berada di penguasaan bendahara yang bukan berasal dari UP/TUP. Rincian saldo kas lainnya dan setara kas per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

- Saldo kas di bendahara pengeluaran yang belum disalurkan ke penerima (Saldo LS-Bendahara) sebesar Rp2.106.266.185,00; dan

b. Penerimaan uang potongan pajak yang belum disetor
Rp8.050.531,00.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing Satker per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30-Jun-26			31-Dec-25		
		Satuan Kerja		Jumlah	Satuan Kerja		Jumlah
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.114.316.717	-	2.114.316.717	504.857.652	-	504.857.652
	Jumlah	2.114.316.717	-	2.114.316.717	504.857.652	-	504.857.652

C.1.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

*Belanja Dibayar
Dimuka Rp0*

Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp399.889.573,00. Beban Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK

*Piutang Bukan
Pajak Rp0*

Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp17.274.136,00 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Rincian Piutang Bukan Pajak masing-masing Satker per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Piutang Bukan Pajak
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30-Jun-26			31-Dec-25		
		Satuan Kerja		Jumlah	Satuan Kerja		Jumlah
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Piutang Lainnya	-	-	-	17.274.136	-	17.274.136
	Jumlah	-	-	-	17.274.136	-	17.274.136

C.1.5. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Piutang
Bukan Pajak Rp0*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan minus Rp86.371,00. Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2026 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digolongkan dalam

piutang dengan kualitas lancar. Dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek sesuai dengan yang diatur di PMK Nomor 69/PMK/06/2014 menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

C.1.6. PERSEDIAAN

Persediaan
Rp788.735.999

Nilai Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp788.735.999,00 dan Rp529.150.682,00. Persediaan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Persediaan
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30 Juni 2026			31-Dec-25		
		Satuan Kerja		Jumlah	Satuan Kerja		Jumlah
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Barang Konsumsi	123.323.816	479.517.975	602.841.791	173.381.106	191.429.020	364.810.126
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	30.189.200	79.150.700	109.339.900	27.399.250	30.243.274	57.642.524
3	Persediaan Lainnya	76.554.308	-	76.554.308	106.698.032	-	106.698.032
	Jumlah	230.067.324	558.668.675	788.735.999	307.478.388	221.672.294	529.150.682

Saldo persediaan per 30 Juni 2026 berdasarkan metode FIFO. Saldo persediaan menurut unit kerja per 30 Juni 2026 disajikan pada Lampiran XI.

C.2. ASET TETAP

Aset Tetap
Rp25.259.144.294

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp25.259.144.294,00 dan Rp22.419.090.891,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Aset Tetap
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30-Jun-26			31-Dec-25		
		Satuan Kerja		Jumlah	Satuan Kerja		Jumlah
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Peralatan dan Mesin	96.876.783.208	15.771.630.615	112.648.413.823	90.036.107.860	14.450.081.751	104.486.189.611
2	Jalan, ligasi dan Jaringan	2.231.461.587	-	2.231.461.587	2.231.461.587	-	2.231.461.587
3	Aset Tetap Lainnya	266.631.000	-	266.631.000	266.631.000	-	266.631.000
Total Nilai Perolehan		99.374.875.795	15.771.630.615	115.146.506.410	92.534.200.447	14.450.081.751	106.984.282.198
Akumulasi Penyusutan		- 81.421.731.432	- 8.465.630.684	- 89.887.362.116	- 70.088.398.684	- 77.675.744.228	- 6.889.447.079
Jumlah		17.953.144.363	7.305.999.931	25.259.144.294	22.445.801.763	63.225.662.477	100.094.835.119

C.2.1. PERALATAN DAN MESIN

*Peralatan dan
Mesin
Rp112.648.413.823*

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp112.648.413.823,00 dan Rp104.486.189.611,00. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin terdiri pembelian sebesar Rp8.329.855.856,00 dan reklas masuk sebesar Rp263.358.621,00. Terdapat mutasi kurang berupa reklas keluar sebesar Rp263.358.621,00 dan penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp167.631.644,00. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin

Uraian Transaksi	Saldo (Rp)	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2025		104.486.189.611
Mutasi Tambah:		
Pembelian	8.329.855.856	
Reklas Masuk	263.358.621	
Koreksi Pencatatan		
Total Mutasi Tambah	8.593.214.477	
Mutasi Kurang:		
Reklas Keluar	263.358.621	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	167.631.644	
Total Mutasi Kurang	430.990.265	
Nilai Perolehan per 30 Juni 2026		112.648.413.823
Akumulasi penyusutan per 30 Juni 2026		88.722.153.504
Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026		23.926.260.319

Transaksi penambahan dan pengurangan pada Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 21
Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin

Kode	Uraian	Jumlah (Unit)	Rupiah Aset (Rp)
301	Alat Bantu	0	-
302	Alat Angkutan Darat	0	-
303	Alat Ukur	0	-
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	30	112.591.600
306	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	37	146.390.421
307	Alat Kedokteran	0	-
308	Alat Laboratorium	0	-
309	Alat Khusus Kepolisian	0	-
310	Alat Komputer	15	172.008.244
Total		82	430.990.265

Tabel 22
Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin

Kelompok BMN	Mutasi Peralatan dan Mesin	Kuantitas	Nilai (Rp)
A. Saldo Transaksi Pembelian dan Transfer Masuk			
301	Alat Bantu	1	4.250.000
302	Alat Angkutan	0	-
303	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	-
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	147	1.600.068.101
306	Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	92	824.660.691
307	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	-
308	Alat Laboratorium	3	46.453.060
309	Alat Khusus Kepolisian	0	-
310	Komputer	347	6.043.545.825
319	Peralatan Olahraga	5	74.236.800
Total Saldo Pembelian dan Transfer Masuk		595	8.593.214.477
B. Transaksi Pengembangan Nilai Aset			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
	<i>Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset</i>		-
C. Transaksi Pengembangan Melalui KDP			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
	<i>Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset</i>		-
Mutasi Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026		595	8.593.214.477

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp2.231.461.587

C.2.2. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.231.461.587,00 dan Rp2.231.461.587,00. Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu berupa Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil. Tidak terdapat mutasi tambah dan/atau kurang pada saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026.

Aset Tetap lainnya
Rp266.631.000

C.2.3. ASET TETAP LAINNYA

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp266.631.000,00 dan Rp266.631.000,00. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara fisik berupa wayang, lukisan dan artwork. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan Aset Tetap Lainnya pada Semester I Tahun Anggaran 2026. Saldo Aset Tetap Lainnya seluruhnya ada di Satker 427752 Menko Bidang Perekonomian. Rincian mutasi nilai aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya

Uraian Transaksi	Saldo (Rp)	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2025		26.663.100
Mutasi Tambah:		
Total Mutasi Tambah	-	
Mutasi Kurang:		
Total Mutasi Kurang	-	
Nilai Perolehan per 30 Juni 2026		26.663.100
Akumulasi penyusutan per 30 Juni 2026		0
Nilai Buku Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026		26.663.100

Tabel 24
Mutasi Tambah Saldo Aset Tetap Lainnya

Kode	Uraian	Jumlah (Unit)	Rupiah Aset (Rp)
60102	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-
60103	Kartografi, Naskah, dan Lukisan	-	-
60201	Barang Bercorak Kesenian	-	-
Total		-	-

Tabel 25
Mutasi Kurang Saldo Aset Tetap Lainnya

Kode	Uraian	Jumlah (Unit)	Rupiah Aset (Rp)
60102	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-
60103	Kartografi, Naskah, dan Lukisan	-	-
60201	Barang Bercorak Kesenian	-	-
Total		-	-

C.2.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp89.887.362.116)*

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar minus Rp89.887.362.116,00 dan minus Rp84.565.191.307,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 26
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	112.648.413.823	(88.722.153.504)	23.926.260.319
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.231.461.587	(1.165.208.612)	1.066.252.975
3	Aset Tetap Lainnya	266.631.000	-	266.631.000
Jumlah		115.146.506.410	-89.887.362.116	25.259.144.294

C.3. ASET LAINNYA

*Aset Lainnya
Rp7.089.893.095*

Saldo Aset Lainnya per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.089.893.095,00 dan Rp10.382.253.870,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Tabel 27
Rincian Aset Lainnya
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30 Juni 2026			31-Dec-25		
		Satuan Kerja		Jumlah (Rp)	Satuan Kerja		Jumlah (Rp)
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Aset Tak Berwujud	9.147.750.950	631.903.845	9.779.654.795	9.147.750.950	631.903.845	9.779.654.795
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	3.267.868.275	-	3.267.868.275
3	Aset Lain-lain	3.691.088.090	-	3.691.088.090	3.691.088.090	-	3.691.088.090
	Total Nilai Perolehan	12.838.839.040	631.903.845	13.470.742.885	16.106.707.315	631.903.845	16.738.611.160
	Akumulasi Penyusutan	-	137.925.000	-	13.636.110.880	-	13.705.073.380
	Jumlah	6.595.914.250	493.978.845	7.089.893.095	2.470.596.435	562.941.345	3.033.537.780

C.3.1. ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud
Rp9.779.654.795

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.779.654.795,00 dan Rp9.779.654.795,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa *Software*, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026, rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Transaksi Aset tak Berwujud per 30 Juni 2026

Jenis Transaksi Aset Tak Berwujud	Nilai (Rp)
Saldo Awal	9.779.654.795
- <i>Software</i>	2.782.536.700
- Lisensi	128.000.000
- Hasil Kajian/Penelitian	5.318.010.000
- Aset Tak Berwujud Lainnya	1.551.108.095
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo ATB Per 30 Juni 2026	9.779.654.795
- <i>Software</i>	2.782.536.700
- Lisensi	128.000.000
- Hasil Kajian/Penelitian	5.318.010.000
- Aset Tak Berwujud Lainnya	1.551.108.095

C.3.2. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp0

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp3.267.868.275,00. Saldo tersebut merupakan saldo transaksi RPATA pada rekening

penampungan yang akan dilakukan pembayaran pada TA 2026 setelah pekerjaan TA 2025 telah selesai dilaksanakan.

C.3.3. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain
Rp3.691.088.090

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.691.088.090,00 dan Rp3.691.088.090,00. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) terdiri atas aset tetap dan aset tak berwujud yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas, atau dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, terdiri atas:

Tabel 29
Rincian Aset Lain-Lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	3.691.088.090	3.691.088.090
Jumlah		3.691.088.090	3.691.088.090

Tidak terdapat mutasi atas saldo aset lain-lain per 30 Juni 2026, rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Mutasi Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai perolehan per 31 Desember 2025	3.691.088.090
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo Akhir per 30 Juni 2026	3.691.088.090

C.3.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

Akumulasi
Penyusutan Aset
Lain-lain
(Rp6.440.449.790)

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar minus Rp6.440.449.790,00 dan minus Rp6.356.357.290,00.

Tabel 31
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2026

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	2.782.536.700	(2.736.561.700)	45.975.000
2	Lisensi	128.000.000	(12.800.000)	115.200.000
3	Hasil Kajian/Penelitian	5.318.010.000	-	5.318.010.000
4	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.551.108.095	-	1.551.108.095
Jumlah A. Aset Tak Berwujud		9.779.654.795	(2.749.361.700)	7.030.293.095
B	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			
1	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		-	-	-
C	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	3.691.088.090	(3.691.088.090)	-
Jumlah B. Aset Lainnya		3.691.088.090	(3.691.088.090)	-
D	Aset Lainnya Yang Belum Diregister			
1	Aset Lainnya Yang Belum Diregister	-	-	-
Aset Lainnya Yang Belum Diregister		-	-	-
Total		13.470.742.885	-6.440.449.790	7.030.293.095

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek
Rp21.983.394.907

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.983.394.907,00 dan Rp10.521.347.672,00 yang merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Tabel 32
Rincian Utang Jangka Pendek
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30-Jun-26			31-Dec-25		
		Satuan Kerja		Jumlah	Satuan Kerja		Jumlah
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	13.372.879.231	2.447.128.582	15.820.007.813	8.937.625.891	1.081.276.629	10.018.902.520
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	4.157.431.083	197.999.480	4.355.430.563	-	-	-
3	Utang Muka dari KPPN	1.499.906.000	300.000.000	1.799.906.000	-	-	-
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.050.531	-	8.050.531	502.445.152	-	502.445.152
Jumlah		19.038.266.845	2.945.128.062	21.983.394.907	9.440.071.043	1.081.276.629	10.521.347.672

C.4.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang Kepada Pihak ketiga
Rp15.820.007.813

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp15.820.007.813,00 dan Rp10.018.902.520,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 33
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2026

Uraian Akun	30-Jun-26			Keterangan
	Satuan Kerja		Jumlah	
	427752 (Rp)	427755 (Rp)		
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	8.918.509.266	1.866.539.575	10.785.048.841	Tagihan atas belanja pegawai yang belum menjadi SP2D
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.348.103.779	580.589.007	2.928.692.786	Tagihan atas belanja barang yang belum menjadi SP2D
Pengeluaran Transito yang masih harus dibayar	357.680.000	-	357.680.000	Saldo atas kas di Bendahara Pengeluaran TUP namun belum dilakukan pertanggungjawaban TUP per tanggal pelaporan
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.748.586.186	-	1.748.586.186	Saldo atas kas yang masuk ke rekening bendahara namun belum diserahkan ke penerima diluar TUP.
Total	13.372.879.231	2.447.128.582	15.820.007.813	-

C.4.2. UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN

*Utang Yang
Belum Ditagihkan
Rp4.355.430.563*

Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.355.430.563 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan saldo atas pencatatan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan Surat Perintah Bayar yang belum dilakukan penerbitan Surat Perintah Pembayaran.

C.4.3. UANG MUKA DARI KPPN

*Uang Muka Dari
KPPN
Rp1.799.906.000*

Saldo Uang Muka Dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.799.906.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.4.4. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp8.050.531*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 bersaldo Rp8.050.531,00 dan Rp502.445.152,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada per tanggal 30 Juni 2026 merupakan saldo kas yang berasal dari pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo Utang Pajak Bendahara Yang Belum Disetor per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.050.531,00 yang terdiri atas PPN sebesar

Rp1.491.600,00, PPh Pasal 21 sebesar Rp2.481.000,00, PPh Pasal 22 sebesar Rp3.492.531,00, dan PPh Pasal 23 sebesar Rp585.400,00..

Tabel 34
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025

No	Uraian	30-Jun-26			31-Dec-25		
		Satuan Kerja		Jumlah	Satuan Kerja		Jumlah
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	8.050.531	-	8.050.531	502.445.152	-	502.445.152
Jumlah		8.050.531	-	8.050.531	502.445.152	-	502.445.152

C.5. EKUITAS

Ekuitas

Rp15.009.001.198

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp15.009.001.198,00 dan Rp23.731.082.761,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00. Tidak terdapat Pendapatan PNBPN untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026.

Tabel 35
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Naik/Turun (%)
Pendapatan PNBPN Lainnya				
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	209.400	(209.400)	100%
Jumlah	-	209.400	(209.400)	(100%)

D.2. BEBAN PEGAWAI

*Beban Pegawai
Rp93.804.162.411*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp93.804.162.411,00 dan Rp75.411.964.260,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah Beban Pegawai mengalami kenaikan dibandingkan 30 Juni 2026 dikarenakan meningkatnya belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertambahnya pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta meningkatnya realisasi pembayaran tunjangan kinerja pada tahun 2026. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 36
Rincian Beban Pegawai
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	30-Jun-26 (Rp)	30-Jun-25 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	23.533.236.042	20.056.029.709	3.477.206.333	17,34%
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	410.160	307.413	102.747	33,42%
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.297.647.634	1.210.669.070	86.978.564	7,18%
511122	Beban Tunj. Anak PNS	328.122.936	315.020.426	13.102.510	4,16%
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1.756.640.000	1.813.975.000	(57.335.000)	-3,16%
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.822.611.676	2.349.778.950	472.832.726	20,12%
511125	Beban Tunj. PPh PNS	410.038.608	408.330.085	1.708.523	0,42%
511126	Beban Tunj. Beras PNS	1.064.067.060	916.330.260	147.736.800	16,12%
511129	Beban Uang Makan PNS	1.967.497.000	1.726.901.000	240.596.000	13,93%
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	455.010.000	273.989.550	181.020.450	66,07%
511152	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	157.500.000	122.500.000	35.000.000	28,57%
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	4.435.636.748	1.240.094.400	3.195.542.348	257,69%
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	86.397	26.093	60.304	231,11%
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	229.471.132	40.375.400	189.095.732	468,34%
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	52.533.519	7.756.728	44.776.791	577,26%
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	241.349.076	204.327.000	37.022.076	18,12%
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	226.698.740	46.348.800	180.349.940	389,11%
511628	Beban Uang Makan PPPK	472.531.000	131.975.000	340.556.000	258,05%
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	177.099.536	-	177.099.536	0
512211	Beban Uang Lembur	441.573.000	225.979.000	215.594.000	95,40%
512212	Beban Uang Lembur PPPK	188.170.000	3.867.000	184.303.000	4766,05%
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	48.519.032.302	42.750.372.938	5.768.659.364	13,49%
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	5.027.199.845	1.567.010.438	3.460.189.407	220,81%
	Pengembalian Beban Pegawai	-	-	-	-
	Jumlah	93.804.162.411	75.411.964.260	18.392.198.151	24,39%

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp1.092.353.677

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.092.353.677,00 dan Rp768.886.439,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Beban Persediaan
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Naik / (Turun) (Rp)	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	999.405.565	630.534.595	368.870.970	58,50%
593149	Beban Persediaan Lainnya	92.948.112	138.351.844	(45.403.732)	(32,82%)
	Jumlah Beban Persediaan	1.092.353.677	768.886.439	323.467.238	42,07%

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

*Beban Barang dan
Jasa
Rp70.425.941.123*

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp70.425.941.123,00 dan Rp128.125.632.400,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Penurunan beban barang dan jasa pada Semester I TA 2026 dikarenakan pada TA 2025 terdapat Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust yang digunakan untuk pembayaran biaya keanggotaan OECD namun pada Semester I Tahun 2026 belum terdapat pembayaran atas biaya tersebut. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
521111	Beban Keperluan Perkantoran	2.890.199.104	3.032.135.843	(141.936.739)	(4,68%)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	714.300	719.100	(4.800)	(0,67%)
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	333.667.889	238.146.500	95.521.389	40,11%
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2.307.898.428	978.538.051	1.329.360.377	135,85%
521211	Beban Bahan	4.037.057.687	1.803.810.569	2.233.247.118	123,81%
521213	Beban Honor Output Kegiatan	1.615.215.000	272.830.000	1.342.385.000	492,02%
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	470.540.229	78.114.592	392.425.637	502,37%
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2.630.700	45.014.000	(42.383.300)	(94,16%)
522111	Beban Langganan Listrik	1.899.851.549	1.732.236.355	167.615.194	9,68%
522112	Beban Langganan Telepon	18.650.551	19.097.658	(447.107)	(2,34%)
522113	Beban Langganan Air	58.187.185	62.766.030	(4.578.845)	(7,30%)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.756.041.607	4.175.409.414	580.632.193	13,91%
522131	Beban Jasa Konsultan	1.252.965.676	433.759.545	819.206.131	188,86%
522141	Beban Sewa	35.778.896.858	39.904.372.848	(4.125.475.990)	(10,34%)
522151	Beban Jasa Profesi	833.900.000	177.500.000	656.400.000	369,80%
522191	Beban Jasa Lainnya	14.169.524.360	75.171.181.895	(61.001.657.535)	(81,15%)
	<i>Pengembalian Beban Barang & Jasa</i>	-	-	-	-
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	70.425.941.123	128.125.632.400	(57.699.691.277)	(45,03%)

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

*Beban
Pemeliharaan
Rp5.743.044.875*

Beban Pemeliharaan pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp5.743.044.875,00 dan Rp1.666.452.800,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.899.505.440	181.064.421	3.718.441.019	2053,66%
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.647.816.747	1.374.349.475	273.467.272	19,90%
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	195.722.688	111.038.904	84.683.784	76,26%
Jumlah		5.743.044.875	1.666.452.800	4.076.592.075	244,63%

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas
Rp42.430.652.999

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp42.430.652.999,00 dan Rp12.045.236.296,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian beban perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.961.213.762	2.056.535.836	6.904.677.926	335,74%
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	556.383.170	158.135.000	398.248.170	251,84%
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.956.696.787	1.331.681.000	1.625.015.787	122,03%
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.293.574.843	1.442.183.980	10.851.390.863	752,43%
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	-	5.876.755.473	(5.876.755.473)	(100,00%)
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	17.662.784.437	1.179.945.007	16.482.839.430	1396,92%
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		42.430.652.999	12.045.236.296	30.385.416.703	252,26%

D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp5.573.894.953

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp5.573.894.953,00 dan Rp5.513.272.593,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.461.743.164	5.352.213.354	109.529.810	2,05%
Beban Penyusutan Jaringan	28.059.289	28.059.289	-	0,00%
Beban Amortisasi Software	22.987.500	48.078.500	(25.091.000)	(52,19%)
Beban Amortisasi Lisensi	6.400.000	-	6.400.000	0
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan	54.705.000	83.786.250	(29.081.250)	(34,71%)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	1.135.200	(1.135.200)	(100,00%)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.573.894.953	5.513.272.593	60.622.360	1,10%

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp(86.371)*

D.8. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar minus Rp86.371,00 dan minus Rp20.321,00. Saldo atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terjadi atas penyesuaian atas saldo pada akun penyisihan piutang tak tertagih periode berjalan dengan periode sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian Jenis Belanja	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(86.371)	(20.321)	(66.050)	325,03%
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(86.371)	(20.321)	(66.050)	325,03%

*Kegiatan Non
Operasional
Rp139.390.535*

D.9. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2026 sebesar Rp139.390.535,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2025	30 Juni 2025	Naik (Turun)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional				
- Surplus (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	7.680.000	-	7.680.000	0
# Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7.680.000	-	7.680.000	0
# Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	100,00%
- Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	131.710.535	215.415.295	(83.704.760)	(38,86%)
# Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	131.710.535	215.415.295	(83.704.760)	(38,86%)
a. Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	18.745.367	3.191.705	15.553.662	487,32%
b. Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL	112.965.168	135.423.590	(22.458.422)	(16,58%)
c. Penerimaan Kembali Modal TAYL	-	-	-	-
d. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	76.800.000	(76.800.000)	100,00%
# Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	139.390.535	215.415.295	(76.024.760)	(35,29%)

Adapun surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya diperoleh dari surplus dari pelepasan aset non lancar sebesar Rp7.680.000,00, penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu atas Belanja Pegawai sebesar Rp18.745.367,00 dan atas Belanja Barang sebesar Rp112.965.168,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp23.731.082.761

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2026 dan 1 Januari 2025 masing-masing adalah sebesar Rp23.731.082.761,00 dan Rp30.357.872.400,00.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus (Defisit)
LO
Rp(218.930.573.132)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah defisit sebesar Rp(218.930.573.132,00) dan Rp(233.315.799.772,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi Rp0

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS

Koreksi yang
Menambah Ekuitas
Rp1.226.959

Saldo Koreksi yang menambah ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah bersaldo Rp1.226.959,00. Saldo Koreksi yang menambah ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp1.226.959,00 dan Rp0,00. Saldo per 30 Juni 2026 merupakan saldo atas koreksi atas selisih pertanggungjawaban Beban Sewa Tagihan Listrik Desember 2025 pada Satker 427755.

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar
Entitas
Rp210.207.264.610

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp210.207.264.610,00 dan Rp206.909.055.804,00. Rincian Transaksi antar Entitas s.d. 30 Juni 2026 terdiri dari:

Tabel 44
Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Jenis Beban	Nilai (Rp)
Diterima dari Entitas Lain	(189.605.820)
Ditagikan ke Entitas Lain	210.396.870.430
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	210.207.264.610

E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan Bendahara Umum Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, DDEL sebesar (Rp189.605.820,00), sedangkan DKEL sebesar Rp210.396.870.430,00. Rincian DDEL dan DKEL per satker adalah sebagai berikut:

Diterima dari Entitas Lain
Rp(189.605.820)

Tabel 45
Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Jenis Beban	Nilai (Rp)
Satker 427752	(180.331.324)
Satker 427755	(9.274.496)
Jumlah	(189.605.820)

Ditagikan ke Entitas Lain
Rp210.396.870.430

Tabel 46
Rincian Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Jenis Beban	Nilai (Rp)
Satker 427752	175.392.068.714
Satker 427755	35.004.801.716
Jumlah	210.396.870.430

E.5.2. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung Rp0

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Detail mengenai kegiatan pengesahan hibah langsung sampai dengan 30 Juni 2026 dapat dilihat pada poin F.3.3. Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Pengesahan Hibah

Satker	Nilai (Rp)
Satker 427752	-
Satker 427755	-
Jumlah	-

E.6. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir
Rp15.009.001.198

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp15.009.001.198,00 dan Rp13.951.128.432,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan dua rekening induk untuk menampung uang keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN, yaitu:

- 1) Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) mengelola rekening Induk pada Bank Mandiri Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 1030007727577, yang bersaldo sebesar Rp2.286.433.285,00 per tanggal 30 Juni 2026. Atas rekening induk tersebut, terdapat 16 *virtual account* yang seluruhnya bersaldo sebesar Rp2.286.433.285,00 per tanggal 30 Juni 2026.
- 2) Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) mengelola rekening Induk pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 651164277551000 yang bersaldo sebesar Rp287.378.359,00 per tanggal 30 Juni 2026.

F.2. PENGUNGKAPAN ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET, DAN REALISASI RINCIAN OUTPUT BERDASARKAN FUNGSI APBN DAN PRIORITAS NASIONAL SEMESTER I TAHUN 2026

F.2.1 PELAPORAN ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET, DAN REALISASI RINCIAN OUTPUT SEMESTER I TAHUN 2026

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) 2, 3, 4, 5, dan 7 dan Fungsi APBN Ekonomi 04.

Pagu Anggaran PN tersebut adalah Rp34.147.581.000,00 dan sampai dengan 30 Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp11.240.461.707,00. Program/Kegiatan dalam PN 2, 3, 4, 5, dan 7 pada Fungsi APBN Ekonomi 04 antara lain sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV.

F.2.2 CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TAHUN 2026

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2026 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain sebagaimana disajikan pada Lampiran XIII.

F.2.3 CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SEMESTER I TAHUN 2026

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdapat alokasi anggaran untuk program prioritas nasional, yaitu sebagai berikut.

1. Prioritas Nasional (PN) 2 – Menetapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

PN 2 memiliki 2 program prioritas, 2 kegiatan prioritas, 3 proyek prioritas, dan 3 rincian output yang berada di 1 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp9.876.069.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.651.413.083,00 dengan rincian sebagaimana Lampiran XIV.

2. Prioritas Nasional (PN) 3 – Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

PN 3 memiliki 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, 1 proyek prioritas, dan 1 rincian output yang berada di 1 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp1.503.209.000,00 dan realisasi sebesar Rp764.610.563,00 dengan rincian Lampiran XIV.

3. Prioritas Nasional (PN) 4 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

PN 4 memiliki 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, 2 proyek prioritas, dan 3 rincian output yang berada di 1 satuan kerja dengan

pagu mencapai Rp5.071.069.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.584.786.449,00 dengan rincian Lampiran XIV.

4. Prioritas Nasional (PN) 5 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

PN 5 memiliki 4 program prioritas, 9 kegiatan prioritas, 6 proyek prioritas, dan 13 rincian output yang tersebar di 2 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp16.771.494.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.877.028.836,00 dengan rincian Lampiran XIV.

5. Prioritas Nasional (PN) 7 – Memperkuat Reformasi Publik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

PN 5 memiliki 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, 1 proyek prioritas, dan 1 rincian output yang berada pada 1 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp925.740.000,00 dan realisasi sebesar Rp362.622.776,00 dengan rincian Lampiran XIV.

F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.3.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA

Terdapat 1 paket BMN berupa Peralatan Mesin dan Meubelair terdiri dari PC, Printer, Meja, Kursi Besi, Mesin Jilid, dan Lensa Kamera yang tidak dapat digunakan kembali, telah disampaikan usulan permohonan lelang BMN kepada Kepala KPKNL Jakarta I. Pendapatan atas lelang tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Lelang dengan Nomor: 145/07.01/2026-01 Tanggal 18 Juni 2026 sebesar Rp7.680.000,00.

F.3.2. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN

Terdapat revisi yang dilakukan atas DIPA Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA.035) yaitu pada:

- Satuan Kerja 427752 (Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) melaksanakan Revisi DIPA Nomor DIPA-035.01.1.427752/2054 sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan tanggal revisi terakhir 16 Juli 2026 dengan besaran pagu sebesar Rp388.784.305.000,00.
- Satuan Kerja 427755 (Satker Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus) melaksanakan Revisi DIPA Nomor DIPA-035.01.1.427755/2025 sebanyak 7 (sepuluh) kali, dengan tanggal

revisi terakhir 15 Juli 2026 dengan besaran pagu sebesar Rp70.237.923.000,00.

F.3.3. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI

Informasi mengenai Hibah Langsung tahun 2026 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

a. HIBAH PROSPERA

Hibah Jasa tersebut berdasarkan pada perjanjian hibah yang tertuang dalam Subsidiary Arrangement (SA) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tanggal 4 Desember 2017, dengan masa perjanjian oleh kedua belah pihak untuk periode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2023 dengan total alokasi nilai hibah sebesar AUD 145.000.000 dan teregister dengan nomor 23TSV7CA. Kegiatan hibah yang dibiayai dari pemerintah Australia dilaksanakan melalui proyek Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA) yang dilaksanakan oleh 26 Instansi Pemerintah. Pada tanggal 27 Maret 2023 telah dilakukan pengajuan perpanjangan program kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPPR sampai dengan 28 Februari 2026 dengan alokasi nilai hibah menjadi sebesar AUD 259.000.000

Realisasi kegiatan hibah untuk tahun 2019 sebesar Rp76.836.389.526,00, untuk kegiatan Tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp141.911.292.772,00, untuk kegiatan Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp128.058.431.254,00, untuk kegiatan hibah tahun 2023 sebesar Rp124.368.030.608,00, realiasi untuk kegiatan hibah tahun 2024 sebesar Rp292.716.658.597,00, dan realisasi kegiatan hibah tahun 2025 sebesar Rp262.112.065.845,00.

b. Hibah Rebana Area Development - Japan International Cooperation Agency (JICA)

Hibah Rebana Area Development telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan nomor register 2FLG7GNA dengan pagu sebesar JPY 132.680.000. Hibah tersebut dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan JICA pada tanggal 7 Desember 2023 dan berakhir pada 23 April 2026.

F.3.4. TRANSAKSI RESIPROKAL

Sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-2/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal

pada Laporan Kementerian/Lembaga, bahwasanya terdapat transaksi resiprokal antara Kemenko Bidang Perekonomian dengan Instansi Pemerintah Lainnya diantaranya sebagai berikut

Tabel 48
Transaksi Resiprokal
Kemenko Bidang Perekonomian dengan Instansi Pemerintah Lainnya
Per 30 Juni 2026

No	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Belanja	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Pendapatan
1	427752	Menko Bidang Perekonomian	2.100.000	017220	Badan Kepegawaian Negara Kantor Pusat Jakarta	2.100.000
2	427752	Menko Bidang Perekonomian	104.650.000	450460	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	104.650.000
3	427752	Menko Bidang Perekonomian	213.452.541	559683	Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	213.452.541

Rincian Belanja atas transaksi resiprokal tersebut terdiri dari Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp106.750.000,00 dan Belanja Sewa sebesar Rp213.452.541,00.

F.3.5. INFORMASI TUNTUTAN HUKUM

Terdapat informasi tuntutan hukum atas perkara nomor 451/PK/PDT/2019 dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benada materiil dan immateriil pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999. Terkait dengan progres penyelesaian perkara tersebut, saat ini masih dalam proses perhitungan alokasi ganti rugi oleh Tim Panel yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial dan belum ada perkembangan lanjutan mengenai informasi posisi terakhir atas tindak lanjut putusan pengadilan dimaksud antara lain terkait dengan informasi posisi terakhir atas tindak lanjut pengadilan dimaksud termasuk atas penganggaran dan nilai tertanggungnya. Berdasarkan informasi dalam Data Tuntutan Hukum, potensi pengeluaran negara adalah sebesar Rp394.451.450.000,00. Angka tersebut adalah perkiraan, angka pasti hanya bisa diketahui setelah dilakukan audit terhadap identifikasi jumlah KK sebagaimana dalam gugatan dan setelah ada pengurangan terhadap KK yang melakukan *option out*.

LAMPIRAN PENDUKUNG



SALINAN

RISALAH LELANG

NOMOR : 145/07.01/2026-01

TANGGAL : 18 Juni 2026

PEJABAT LELANG : Rachman Sucipto, S.E., M.M.

PENJUAL : Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian – Sekretariat Jenderal Dewan
Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I**

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 145/07.01/2026-01

-----Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (18-06-2026), dimulai pukul sebelas (11:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

Rachman Sucipto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, NIP 19850724 201012 1
----- 006 -----

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KM.6/UP.11/2013 tanggal 08 April 2013, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-826/KNL.0701/2026 tanggal 02 Juni 2026 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 DKI Jakarta. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Susiwiwono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor BM.02.13/169/SES.M.EKON/05/2026 tanggal 21 Mei 2026, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-469/1/KNL.0701/2026 tanggal 03 Juni 2026 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor BM.02.13/141/SES.M.EKON/04/2026 tanggal 29 April 2026. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Hary Gunawan berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor KEP 1 Tahun 2026 tanggal 05 Januari 2026; BM.02.13/62/SES.M.EKON/05/2026 tanggal 21 Mei 2026 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta I. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) paket BMN berupa Peralatan Mesin dan Meubelair terdiri dari PC, Printer, Meja, Kursi Besi, Lemari Besi, Mesin Jilid, dan Lensa Kamera -----

Nilai Limit : Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) -----
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Lantai 3 Gedung MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 04 Juni 2026. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman

Lelang, dengan.../Lembar Kedua

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

- Lelang, dengan ketentuan: -----
1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
 - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
 - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
 2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
 - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
 - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ---
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran

tertinggi secara.../Lembar Ketiga

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal.../Lembar Keempat

Pejabat Lelang

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

- Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----
- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
- Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
- Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
- Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
- Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----
- Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang

keadaan sesungguhnya.../Lembar Kelima

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta I. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah satu penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) paket BMN berupa Peralatan Mesin dan Meubelair terdiri dari PC, Printer, Meja, Kursi Besi, Lemari Besi, Mesin Jilid, dan Lensa Kamera -----

Harga Lelang ----- : Rp7.680.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Rudi, NIK 3527020507040002, Belum/Tidak Bekerja,
----- beralamat di Dusun Kanjar Utara RT/RW.000/000
----- Kelurahan/Desa Kanjar Kecamatan Torjun Kabupaten
----- Sampang Provinsi Jawa Timur -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 145/07.01/2026-01 tanggal 18 Juni 2026

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp7.680.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 18 (delapan belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Hary Gunawan

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 22 JUN 2026
Plt. Kepala KPKNL Jakarta I

Laila Chairani
NIP 19680913 199603 2 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemkeu.go.id

RINCIAN PENGELUARAN UANG PEMBAYARAN LELANG
KEPADA YANG BERHAK

Nomor Risalah Lelang : 145/07.01/2026-01
Tanggal Lelang : 18 Juni 2026
Pejabat Lelang : Rachman Sucipto

1 Pokok Lelang	Rp.	7.680.000,00
2 Hasil Bersih Lelang Untuk Pemohon Lelang	Rp.	7.680.000,00
3 Bea Lelang		
a. Bea Lelang Pembeli	Rp.	153.600,00
b. Bea Lelang Penjual	Rp.	-
c. Bea Lelang Batal	Rp.	-
4 Pph Final	Rp.	-
5 Meterai	Rp.	10.000,00
6 Uang Jaminan Penawaran Lelang Pembeli Wanprestasi	Rp.	-

Jumlah Rp. 7.843.600,00

(tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Disandatangani secara elektronik
Agus Yulianto

Jakarta, 22 Juni 2026
Bendahara Penerimaan



Disandatangani secara elektronik
Putu Eka Pirtiwani





**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820260619430025
Tanggal Billing	: 19-06-2026 10:01:53
Tanggal Kedaluwarsa	: 26-06-2026 10:01:53
Tanggal Bayar	: 19-06-2026 11:32:01
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	: 153.600 (IDR)
Terbilang	: <i>Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 994489027668
NTPN	: 6C47E55DFS3BHA49

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 153.600 (IDR)
Keterangan	: Bea lelang RL-145/07.01/2026-01



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820260619430249
Tanggal Billing	: 19-06-2026 10:05:51
Tanggal Kedaluwarsa	: 26-06-2026 10:05:51
Tanggal Bayar	: 19-06-2026 11:32:00
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 035 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Eselon I	: 01 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Satuan Kerja	: 427755 - SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Total Disetor	: 7.680.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 788275027524
NTPN	: FC2C28N3F6CT5AB9

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 7.680.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL-145/07.01/2026-01 tgl. 18 Juni 2026

**Lampiran II Daftar Saldo Rekening
Per 30 Juni 2026**

No.	Kode Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Kode	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	
						Nomor	Tanggal			
1	427752	8100-1242-7752-1000	BPG 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	20	S-258/SES.M.EKON/05/2020	27/05/2020	30/06/2026	Rp	-
2	427752	8100-1242-7752-1001	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	30/06/2026	Rp	22.696.000
3	427752	8100-1242-7752-1002	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	23/06/2026	Rp	350.000.000
4	427752	8100-1242-7752-1003	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	30/06/2026	Rp	1.614.127.035
5	427752	8100-1242-7752-1004	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	26/06/2026	Rp	47.529.998
6	427752	8100-1242-7752-1005	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	30/06/2026	Rp	8.500.000
7	427752	8100-1242-7752-1006	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	30/06/2026	Rp	11.055.512
8	427752	8100-1242-7752-1007	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	30/06/2026	Rp	80.000.000
9	427752	8100-1242-7752-1008	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	30/06/2026	Rp	31.705.600
10	427752	8100-1242-7752-1009	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	30/06/2026	Rp	61.366.250
11	427752	8100-1242-7752-1010	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	30/06/2026	Rp	25.171.500

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

No.	Kode Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Kode	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	
						Nomor	Tanggal			
12	427752	8100-1242-7752-1011	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	19/12/2024	Rp	-
13	427752	8100-1242-7752-1012	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	29/06/2026	Rp	-
14	427752	8100-1242-7752-1013	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	30/06/2026	Rp	33.936.390
15	427752	8100-1242-7752-1014	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-690/KPN.1202/2022	18/05/2022	30/06/2026	Rp	345.000
16	427752	8100-1242-7752-1015	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-690/KPN.1202/2022	18/05/2022	31/10/2023	Rp	-
17	427752	1030010471304	RPL 140 PDHL KEMKO EKON untuk 2ELXFXTA	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	30	000348	06/04/2024	31/12/2024	Rp	-
18	427752	1030010510069	RPL 140 PDH KEMKO EKON untuk 2ELXFXTA	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	30	000349	12/04/2024	04/12/2024	Rp	-
19	427755	1030011339633	RPL 140 PDH KEMENKOEKON untuk 2KUKEPQA	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	30	000435	25/01/2024	31/12/2024	Rp	-
20	427755	1030011348493	RPL 140 PDHL KEMENKOEKON untuk 2KUKEPQA	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	30	000434	25/01/2024	31/12/2024	Rp	-
21	427755	6511-6427-7551-000	BPG 019 BA 69 PEREKONOMIAN	Bank Rakyat Indonesia KCP Departemen Keuangan	20	S-260/SES.M.EKON/05/2020	29/05/2020	30/06/2026	Rp	287.378.359

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	189,605,820	189,605,820	0	0	756,379,178	756,379,178	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	189,605,820	189,605,820	0	0	756,379,178	756,379,178	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	189,605,820	189,605,820	0	0	756,379,178	756,379,178	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	459,022,228,000	210,396,870,430	(248,625,357,570)	45.84	459,766,254,000	151,459,917,336	(308,306,336,664)	32.94
1. Belanja Pegawai	166,458,478,000	89,521,715,967	(76,936,762,033)	53.78	141,598,732,000	71,621,812,374	(69,976,919,626)	50.58
2. Belanja Barang	283,372,877,000	112,545,298,607	(170,827,578,393)	39.72	313,309,679,000	76,211,036,088	(237,098,642,912)	24.32
3. Belanja Modal	9,190,873,000	8,329,855,856	(861,017,144)	90.63	4,857,843,000	3,627,068,874	(1,230,774,126)	74.66
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 035

Tgl Data : 20/07/26 3:46 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 6:09 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	459,022,228,000	210,396,870,430	(248,625,357,570)	45.84	459,766,254,000	151,459,917,336	(308,306,336,664)	32.94
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 20/07/26 6:09 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	28,001,677,000	38,447,159,000	20,889,595,710	11,198,018	20,878,397,692	54.33	17,568,761,308
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	474,000	658,000	371,773	0	371,773	56.5	286,227
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,489,425,000	1,668,193,000	1,153,256,564	0	1,153,256,564	69.13	514,936,436
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	966,004,000	420,847,000	291,722,490	0	291,722,490	69.32	129,124,510
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,998,794,000	3,133,570,000	1,567,830,000	0	1,567,830,000	50.03	1,565,740,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,115,951,000	5,095,029,000	2,511,431,000	52,005,324	2,459,425,676	49.29	2,635,603,324
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	496,555,000	539,403,000	399,126,347	0	399,126,347	73.99	140,276,653
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,273,006,000	1,767,757,000	946,746,660	0	946,746,660	53.56	821,010,340
511129	Belanja Uang Makan PNS	6,583,549,000	4,487,954,000	1,967,497,000	0	1,967,497,000	43.84	2,520,457,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	565,835,000	714,870,000	428,615,000	0	428,615,000	59.96	286,255,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	45,491,270,000	56,275,440,000	30,156,192,544	63,203,342	30,092,989,202	53.59	26,182,450,798
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	225,403,000	181,400,000	140,000,000	0	140,000,000	77.18	41,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	225,403,000	181,400,000	140,000,000	0	140,000,000	77.18	41,400,000
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	5,872,546,000	7,229,088,000	3,903,931,348	0	3,903,931,348	54	3,325,156,652
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	43,000	208,000	76,824	0	76,824	36.93	131,176
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	552,394,000	291,388,000	201,589,822	0	201,589,822	69.18	89,798,178
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	214,863,000	68,553,000	46,099,169	0	46,099,169	67.25	22,453,831
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	428,259,000	334,399,000	214,001,076	0	214,001,076	64	120,397,924
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	450,002,000	291,055,000	199,251,560	0	199,251,560	68.46	91,803,440
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,292,125,000	2,004,021,000	472,531,000	0	472,531,000	23.58	1,531,490,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	230,039,000	301,370,000	155,329,536	0	155,329,536	51.54	146,040,464
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	9,040,271,000	10,520,082,000	5,192,810,335	0	5,192,810,335	49.36	5,327,271,665
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	636,164,000	1,695,984,000	441,573,000	0	441,573,000	26.04	1,254,411,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	106,605,000	644,835,000	188,170,000	0	188,170,000	29.18	456,665,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	742,769,000	2,340,819,000	629,743,000	0	629,743,000	26.9	1,711,076,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	67,544,921,000	88,225,889,000	48,446,501,235	16,697,616	48,429,803,619	54.91	39,796,085,381
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	8,029,037,000	8,914,848,000	5,036,369,811	0	5,036,369,811	56.49	3,878,478,189
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	75,573,958,000	97,140,737,000	53,482,871,046	16,697,616	53,466,173,430	55.06	43,674,563,570
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	131,073,671,000	166,458,478,000	89,601,616,925	79,900,958	89,521,715,967	53.83	76,936,762,033

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 20/07/26 6:09 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,338,182,000	6,716,577,000	2,522,926,201	3,014,640	2,519,911,561	37.56	4,196,665,439
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,320,000	26,224,000	714,300	0	714,300	2.72	25,509,700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	109,080,000	1,008,580,000	333,667,889	0	333,667,889	33.08	674,912,111
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,826,625,000	4,791,362,000	2,307,548,428	0	2,307,548,428	48.16	2,483,813,572
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	8,284,207,000	12,542,743,000	5,164,856,818	3,014,640	5,161,842,178	41.18	7,380,900,822
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	16,657,764,000	13,764,332,000	3,863,585,340	0	3,863,585,340	28.07	9,900,746,660
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,488,805,000	9,609,308,000	1,537,350,000	9,975,000	1,527,375,000	16	8,081,933,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,983,753,000	1,053,431,000	445,840,229	0	445,840,229	42.32	607,590,771
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	48,850,000	2,630,700	0	2,630,700	5.39	46,219,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	31,130,322,000	24,475,921,000	5,849,406,269	9,975,000	5,839,431,269	23.9	18,636,489,731
5217	Belanja Kontribusi dan Kompensasi							
521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	0	3,448,257,000	0	0	0	0	3,448,257,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5217	0	3,448,257,000	0	0	0	0	3,448,257,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,408,860,000	3,880,932,000	1,237,494,991	0	1,237,494,991	31.89	2,643,437,009
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	100,000,000	340,000,000	62,804,388	0	62,804,388	18.47	277,195,612
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	3,508,860,000	4,220,932,000	1,300,299,379	0	1,300,299,379	30.81	2,920,632,621
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	4,665,595,000	6,333,430,000	2,167,357,304	0	2,167,357,304	34.22	4,166,072,696
522112	Belanja Langganan Telepon	75,000,000	75,000,000	22,382,979	0	22,382,979	29.84	52,617,021
522113	Belanja Langganan Air	87,600,000	180,000,000	58,187,185	0	58,187,185	32.33	121,812,815
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,936,461,000	9,744,676,000	3,062,474,397	0	3,062,474,397	31.43	6,682,201,603
522131	Belanja Jasa Konsultan	13,259,065,000	9,427,767,000	1,158,257,984	0	1,158,257,984	12.29	8,269,509,016
522141	Belanja Sewa	57,417,220,000	58,441,156,000	35,778,411,763	0	35,778,411,763	61.22	22,662,744,237
522151	Belanja Jasa Profesi	10,654,548,000	5,841,109,000	758,200,000	0	758,200,000	12.98	5,082,909,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	34,133,049,000	32,785,399,000	11,535,265,537	0	11,535,265,537	35.18	21,250,133,463
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	130,228,538,000	122,828,537,000	54,540,537,149	0	54,540,537,149	44.4	68,287,999,851
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95,996,000	5,900,000,000	3,488,196,139	0	3,488,196,139	59.12	2,411,803,861
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,964,613,000	4,235,854,000	1,551,004,257	0	1,551,004,257	36.62	2,684,849,743
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,000,000	0	0	0	0		0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 20/07/26 6:09 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,081,609,000	10,135,854,000	5,039,200,396	0	5,039,200,396	49.72	5,096,653,604
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36,758,558,000	22,016,942,000	8,228,590,135	10,210,678	8,218,379,457	37.37	13,798,562,543
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,875,487,000	1,977,078,000	525,073,170	0	525,073,170	26.56	1,452,004,830
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47,390,851,000	13,209,796,000	2,530,622,787	520,000	2,530,102,787	19.16	10,679,693,213
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	44,877,238,000	24,719,384,000	11,881,275,595	11,997,891	11,869,277,704	48.06	12,850,106,296
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	131,902,134,000	61,923,200,000	23,165,561,687	22,728,569	23,142,833,118	37.41	38,780,366,882
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,000,000,000	10,292,766,000	0	0	0	0	10,292,766,000
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	35,785,104,000	33,504,667,000	17,528,109,472	6,954,354	17,521,155,118	52.32	15,983,511,882
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	36,785,104,000	43,797,433,000	17,528,109,472	6,954,354	17,521,155,118	40.02	26,276,277,882
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	343,920,774,000	283,372,877,000	112,587,971,170	42,672,563	112,545,298,607	39.73	170,827,578,393
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,220,000,000	9,190,873,000	8,329,855,856	0	8,329,855,856	90.63	861,017,144
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	10,220,000,000	9,190,873,000	8,329,855,856	0	8,329,855,856	90.63	861,017,144
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	10,220,000,000	9,190,873,000	8,329,855,856	0	8,329,855,856	90.63	861,017,144
	JUMLAH BELANJA	485,214,445,000	459,022,228,000	210,519,443,951	122,573,521	210,396,870,430	45.86	248,625,357,570

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 20/07/26 6:09 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	7,680,000	0	7,680,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	7,680,000	0	7,680,000	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,745,367	0	18,745,367	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	163,180,453	0	163,180,453	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	181,925,820	0	181,925,820	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	189,605,820	0	189,605,820	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	189,605,820	0	189,605,820	

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data 20/07/26 3:46 PM
Tgl Cetak 20/07/26 6:10 PM
Halaman 1
lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,799,906,000	0	1,799,906,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,114,316,717	504,857,652	1,609,459,065	318.79
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	399,889,573	(399,889,573)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	0	17,274,136	(17,274,136)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(86,371)	86,371	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	17,187,765	(17,187,765)	(100.00)
Persediaan	788,735,999	529,150,682	259,585,317	49.06
JUMLAH ASET LANCAR	4,702,958,716	1,451,085,672	3,251,873,044	224.10
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	112,648,413,823	104,486,189,611	8,162,224,212	7.81
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,231,461,587	2,231,461,587	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	266,631,000	266,631,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(89,887,362,116)	(84,565,191,307)	(5,322,170,809)	6.29
JUMLAH ASET TETAP	25,259,144,294	22,419,090,891	2,840,053,403	12.67
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	9,779,654,795	9,779,654,795	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	3,267,868,275	(3,267,868,275)	(100.00)
Aset Lain-lain	3,691,088,090	3,691,088,090	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(6,440,449,790)	(6,356,357,290)	(84,092,500)	1.32
JUMLAH ASET LAINNYA	7,030,293,095	10,382,253,870	(3,351,960,775)	(32.29)
JUMLAH ASET	36,992,396,105	34,252,430,433	2,739,965,672	8.00
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	15,820,007,813	10,018,902,520	5,801,105,293	57.90
Utang Yang Belum Ditagihkan	4,355,430,563	0	4,355,430,563	0.00
Uang Muka dari KPPN	1,799,906,000	0	1,799,906,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	8,050,531	502,445,152	(494,394,621)	(98.40)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21,983,394,907	10,521,347,672	11,462,047,235	108.94
JUMLAH KEWAJIBAN	21,983,394,907	10,521,347,672	11,462,047,235	108.94
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	15,009,001,198	23,731,082,761	(8,722,081,563)	(36.75)
JUMLAH EKUITAS	15,009,001,198	23,731,082,761	(8,722,081,563)	(36.75)
JUMLAH EKUITAS	15,009,001,198	23,731,082,761	(8,722,081,563)	(36.75)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	36,992,396,105	34,252,430,433	2,739,965,672	8.00

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data 20/07/26 3:46 PM
Tgl Cetak 20/07/26 6:10 PM
Halaman 2
lap_neraca_kl_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 6:10 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,442,226,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	357,680,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2,114,316,717	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	602,841,791	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	109,339,900	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	76,554,308	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	112,648,413,823	0
0.0	134113	Jaringan	2,231,461,587	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	266,631,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	88,722,153,504
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,165,208,612
0.0	162151	Software	2,782,536,700	0
0.0	162161	Lisensi	128,000,000	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	5,318,010,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,551,108,095	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	3,691,088,090	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2,736,561,700
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	12,800,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	3,691,088,090
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	10,785,048,841
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,928,692,786
0.0	212144	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar	0	357,680,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,748,586,186
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	4,355,430,563
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,799,906,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	8,050,531
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	210,396,870,430
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	189,605,820	0
0.0	391111	Ekuitas	0	23,731,082,761
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	1,226,959
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	7,680,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	18,745,367
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	112,965,168
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	23,533,236,042	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	410,160	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,297,647,634	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	328,122,936	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,756,640,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 6:10 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,822,611,676	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	410,038,608	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,064,067,060	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,967,497,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	455,010,000	0
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	157,500,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	4,435,636,748	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	86,397	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	229,471,132	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	52,533,519	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	241,349,076	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	226,698,740	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	472,531,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	177,099,536	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	441,573,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	188,170,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	48,519,032,302	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	5,027,199,845	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,890,199,104	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	714,300	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	333,667,889	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,307,898,428	0
3.0	521211	Beban Bahan	4,037,057,687	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,615,215,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	470,540,229	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,630,700	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,899,851,549	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	18,650,551	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	58,187,185	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,756,041,607	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,252,965,676	0
3.0	522141	Beban Sewa	35,778,896,858	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	833,900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	14,169,524,360	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,899,505,440	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,647,816,747	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8,961,213,762	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	556,383,170	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 6:10 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,956,696,787	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,293,574,843	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	17,662,784,437	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,461,743,164	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	28,059,289	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	22,987,500	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	6,400,000	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	54,705,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	999,405,565	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	195,722,688	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	92,948,112	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	86,371
JUMLAH			352,579,863,869	352,579,863,869

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 6:10 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	210,396,870,430
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	189,605,820	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	7,680,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	18,745,367
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	163,180,453
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	11,198,018
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	20,889,595,710	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	371,773	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,153,256,564	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	291,722,490	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,567,830,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	52,005,324
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,511,431,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	399,126,347	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	946,746,660	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,967,497,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	428,615,000	0
3.0	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	140,000,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,903,931,348	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	76,824	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	201,589,822	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	46,099,169	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	214,001,076	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	199,251,560	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	472,531,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	155,329,536	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	441,573,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	188,170,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	48,446,501,235	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan)	0	16,697,616
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	5,036,369,811	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	3,014,640
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,522,926,201	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	714,300	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	333,667,889	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,307,548,428	0
3.0	521211	Belanja Bahan	3,863,585,340	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,537,350,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 6:10 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	9,975,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	445,840,229	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,630,700	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,237,494,991	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	62,804,388	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,167,357,304	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	22,382,979	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	58,187,185	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,062,474,397	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,158,257,984	0
3.0	522141	Belanja Sewa	35,778,411,763	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	758,200,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	11,535,265,537	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,488,196,139	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,551,004,257	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,228,590,135	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	10,210,678
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	525,073,170	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	520,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,530,622,787	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	11,997,891
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,881,275,595	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	17,528,109,472	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar	0	6,954,354
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,329,855,856	0
JUMLAH			210,709,049,771	210,709,049,771

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 6:10 PM

Halaman : 1

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	209,400	(209,400)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	209,400	(209,400)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	209,400	(209,400)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	93,804,162,411	75,411,964,260	18,392,198,151	24.389
Beban Persediaan	1,092,353,677	768,886,439	323,467,238	42.07
Beban Barang dan Jasa	70,425,941,123	128,125,632,400	(57,699,691,277)	(45.034)
Beban Pemeliharaan	5,743,044,875	1,666,452,800	4,076,592,075	244.627
Beban Perjalanan Dinas	42,430,652,999	12,045,236,296	30,385,416,703	252.261
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 6:10 PM

Halaman : 2

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5,573,894,953	5,513,272,593	60,622,360	1.1
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(86,371)	(20,321)	(66,050)	325.033
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	219,069,963,667	223,531,424,467	(4,461,460,800)	(1.996)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(219,069,963,667)	(223,531,215,067)	4,461,251,400	(1.996)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	7,680,000	0	7,680,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	7,680,000	0	7,680,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	131,710,535	215,415,295	(83,704,760)	(38.857)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	131,710,535	215,415,295	(83,704,760)	(38.857)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	139,390,535	215,415,295	(76,024,760)	(35.292)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(218,930,573,132)	(223,315,799,772)	4,385,226,640	(1.964)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(218,930,573,132)	(223,315,799,772)	4,385,226,640	(1.964)

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 6:10 PM

Halaman : 1

lap_lpe_kl_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	23,731,082,761	30,357,872,400	(6,626,789,639)	(21.83)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(218,930,573,132)	(223,315,799,772)	4,385,226,640	(1.96)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1,226,959	0	1,226,959	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	1,226,959	0	1,226,959	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	210,207,264,610	206,909,055,804	3,298,208,806	1.59
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(8,722,081,563)	(16,406,743,968)	7,684,662,405	(46.84)
EKUITAS AKHIR	15,009,001,198	13,951,128,432	1,057,872,766	7.58

Keterangan :

FINAL

Lampiran VII Barang Milik Negara

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl.Data : 20/07/26 12:35 PM

Tanggal : 20/07/26 6:11 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	602,841,791
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	109,339,900
117199	Persediaan Lainnya	76,554,308
132111	Peralatan dan Mesin	112,648,413,823
134113	Jaringan	2,231,461,587
135121	Aset Tetap Lainnya	266,631,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(88,722,153,504)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,165,208,612)
162151	Software	2,782,536,700
162161	Lisensi	128,000,000
162171	Hasil Kajian/Penelitian	5,318,010,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,551,108,095
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	3,691,088,090
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2,736,561,700)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(12,800,000)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(3,691,088,090)
J U M L A H		33,078,173,388

Lampiran VIII Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Intrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tanggal : 20/07/26 6:12 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	8,733	104,486,189,611	595	8,593,214,477	82	430,990,265	9,246	112,648,413,823
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	1	4,250,000	0	0	1	4,250,000
30103	ALAT BANTU	40	5,353,369,620	0	0	0	0	40	5,353,369,620
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	16	3,518,534,155	0	0	0	0	16	3,518,534,155
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	18	42,813,750	0	0	0	0	18	42,813,750
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	40,334,300	0	0	0	0	5	40,334,300
30303	ALAT UKUR	2	8,382,500	0	0	0	0	2	8,382,500
30501	ALAT KANTOR	1,204	8,911,638,681	92	416,952,091	10	88,276,600	1,286	9,240,314,172
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,352	28,259,685,427	55	1,183,116,010	20	24,315,000	4,387	29,418,486,437
30601	ALAT STUDIO	516	14,158,179,449	92	824,660,691	37	146,390,421	571	14,836,449,719
30602	ALAT KOMUNIKASI	193	959,106,118	0	0	0	0	193	959,106,118
30603	PERALATAN PEMANCAR	8	168,946,050	0	0	0	0	8	168,946,050
30701	ALAT KEDOKTERAN	62	900,932,775	0	0	0	0	62	900,932,775
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	9	36,256,800	0	0	0	0	9	36,256,800
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	14,115,000	2	4,000,000	0	0	5	18,115,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	13,358,400	0	0	0	0	1	13,358,400
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	5	128,476,000	1	42,453,060	0	0	6	170,929,060
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0	0	0	0	0	0	0
30901	SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	1,506	28,943,344,847	305	5,729,854,025	6	116,696,644	1,805	34,556,502,228
31002	PERALATAN KOMPUTER	780	12,839,675,539	42	313,691,800	9	55,311,600	813	13,098,055,739
31501	ALAT DETEKSI	1	22,000,000	0	0	0	0	1	22,000,000
31503	ALAT SAR	1	3,280,000	0	0	0	0	1	3,280,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	11	163,760,200	5	74,236,800	0	0	16	237,997,000
134113	Jaringan	2	2,231,461,587	0	0	0	0	2	2,231,461,587
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	2,231,461,587	0	0	0	0	2	2,231,461,587
135121	Aset Tetap Lainnya	31	266,631,000	0	0	0	0	31	266,631,000
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0	0	0	0	0	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	7	202,371,000	0	0	0	0	7	202,371,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	24	64,260,000	0	0	0	0	24	64,260,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	0	0	31	167,631,644	31	167,631,644	0	0
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM
Tanggal : 20/07/26 6:12 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	2	9,955,000	2	9,955,000	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	20	24,315,000	20	24,315,000	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	2	13,035,000	2	13,035,000	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	6	116,696,644	6	116,696,644	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	1	3,630,000	1	3,630,000	0	0
TOTAL			106,984,282,198		8,760,846,121		598,621,909		115,146,506,410

Lampiran IX Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Ekstrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL

EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tanggal : 20/07/26 6:12 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_kl_poc

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	634	378,592,330	3	2,630,700	0	0	637	381,223,030
30103	ALAT BANTU	5	4,345,000	0	0	0	0	5	4,345,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	1,870,000	0	0	0	0	2	1,870,000
30303	ALAT UKUR	5	200,000	0	0	0	0	5	200,000
30501	ALAT KANTOR	67	56,190,700	0	0	0	0	67	56,190,700
30502	ALAT RUMAH TANGGA	419	249,688,090	3	2,630,700	0	0	422	252,318,790
30601	ALAT STUDIO	46	30,923,240	0	0	0	0	46	30,923,240
30602	ALAT KOMUNIKASI	11	7,128,600	0	0	0	0	11	7,128,600
30603	PERALATAN PEMANCAR	6	1,518,000	0	0	0	0	6	1,518,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	18	6,957,590	0	0	0	0	18	6,957,590
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	17	3,258,110	0	0	0	0	17	3,258,110
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	3	2,500,000	0	0	0	0	3	2,500,000
31503	ALAT SAR	5	693,000	0	0	0	0	5	693,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	30	13,320,000	0	0	0	0	30	13,320,000
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
60501	TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			378,592,330		2,630,700		0		381,223,030

Lampiran X Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Aset Tak Berwujud

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL

ASET TAK BERWUJUD

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tanggal : 20/07/26 6:28 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_kel_kl_poc

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	12	2,782,536,700	0	0	0	0	12	2,782,536,700
80101	ASET TAK BERWUJUD	12	2,782,536,700	0	0	0	0	12	2,782,536,700
162161	Lisensi	1	128,000,000	0	0	0	0	1	128,000,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	128,000,000	0	0	0	0	1	128,000,000
162171	Hasil Kajian/Penelitian	1	5,318,010,000	0	0	0	0	1	5,318,010,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	5,318,010,000	0	0	0	0	1	5,318,010,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	14	1,551,108,095	0	0	0	0	14	1,551,108,095
80101	ASET TAK BERWUJUD	14	1,551,108,095	0	0	0	0	14	1,551,108,095
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	17	3,691,088,090	0	0	0	0	17	3,691,088,090
80101	ASET TAK BERWUJUD	17	3,691,088,090	0	0	0	0	17	3,691,088,090
TOTAL			13,470,742,885		0		0		13,470,742,885

Lampiran XI Rincian Persediaan Menurut Unit Kerja per 30 Juni 2026

No	Satker	Unit Kerja	Nilai (Rp)
1	427752	Biro Umum	153.513.016
2	427752	Poliklinik	76.554.308
3	427755	Setjen DN KEK	558.668.675
JUMLAH			789.735.999

Lampiran XII Monitoring dan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian s.d. 30 Juni 2026

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024 di Jakarta

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah	
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pengendalian atas Pembayaran Uang Makan kepada Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas dalam Kota Belum Memadai	1	IDR 0,00	BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memerintahkan Sekretaris Kemenko Perekonomian agar mengevaluasi dan memutakhirkan sistem presensi pada laman absen.ekon.go.id sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia; dan	1	0						1					IDR 0,00	
				BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memerintahkan Sekretaris Kemenko Perekonomian agar mereviu dan memutakhirkan Permenko Nomor 1 Tahun 2015 sesuai dengan PMK Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.	1	0							1					IDR 0,00
2	Terdapat Pelaksanaan Paket Meeting Fullboard, Fullday, dan Halfday Tidak Sesuai Ketentuan	1	IDR 0,00	BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar memerintahkan Sekretaris Kemenko Perekonomian untuk menginstruksikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku KPA supaya melakukan pembinaan kepada PPK Biro Lintas Sektor, Biro Umum, Deputi I, Deputi III, Deputi IV, dan Deputi VI dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan pengadaan dan pengendalian kontrak	1	0						1					IDR 0,00	
				BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Setdenas KEK untuk menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan selaku KPA supaya melakukan pembinaan kepada PPK atas kekurangcermatannya dalam perencanaan kontrak dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan pengadaan dan pengendalian kontrak.	1	0							1					IDR 0,00
				Jumlah	2		Jumlah	4		Jumlah	0		0		4		0	

HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENKO PEREKONOMIAN TA 2023

[illegible]

[illegible]

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
3	Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Belum Memadai	1		BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar memerintahkan Sekretaris Kemenko Perekonomian melalui Kepala Biro Umum selaku KPB untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Rumah Tangga dan Pengadaan – Biro Umum atas ketidakproaktifannya, dan untuk selanjutnya agar lebih proaktif mengajukan permohonan reklasifikasi dalam daftar barang rusak berat dan menelusuri keberadaan barang yang tidak ditemukan.	1	-	TL Semester II Tahun 2024 Kemenko Bidang Perekonomian menindaklanjuti dengan : 1. ND Nomor PW 06.04/127.1/SES.MEKON/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Pjt. Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perihal Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dimana dalam salah satu pokok Nota Dinas, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta Kepala Biro Umum untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Rumah Tangga dan Pengadaan - Biro Umum atas ketidakproaktifannya, dan untuk selanjutnya agar lebih proaktif mengajukan permohonan reklasifikasi dalam daftar barang rusak berat dan menelusuri keberadaan barang yang tidak ditemukan.								Tindak lanjut diusulkan sesuai rekomendasi.		
							2. ND Nomor PW.05.02/457/SET.MEKON.4/09/2024 tanggal 5 September 2024 dari Pjt. Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2023 dimana dalam salah satu pokok Nota Dinas, Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang memberikan perintah kepada Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan agar lebih proaktif mengajukan permohonan reklasifikasi dalam daftar barang rusak berat dan daftar barang hilang atas barang yang telah rusak berat/hilang.										
							3. Surat Pernyataan Nomor BM.03.11/19/SET.MEKON.4/1/2024 tanggal 14 November 2024 dari Pjt. Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan, bahwa informasi Barang Milik Negara (BMN) yang tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini adalah benar sesuai dengan kondisi sesungguhnya serta hal tersebut berdasarkan hasil kegiatan Inventarisasi BMN yang dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga dapat dilakukan proses Perubahan Kondisi pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sebagai syarat administrasi usulan penghapusan BMN. Lampiran Surat Pernyataan tersebut meliputi 991 item barang sebanyak 991 unit dengan total nilai perolehan Rp3.937.785.727,00 dan nilai buku Rp4.540.800,00.										
							4. ND Nomor BM.03.11/705/SET.MEKON.4/1/2024 tanggal 14 November 2024 dari Pjt. Kepala Biro Umum kepada Pjt. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian perihal Permohonan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara dimana dalam pokok surat Kepala Biro Umum menyatakan bahwa telah dilaksanakan proses inventarisasi terhadap BMN di Tahun 2024, dan menginformasikan bahwa terdapat 991 unit BMN dengan kondisi Rusak Berat yang sudah dilakukan perubahan kondisi pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI), serta mengingat kondisi BMN yang tidak optimal dan memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi jika ingin terus digunakan, Kepala Biro Umum beranggapan bahwa BMN tersebut dapat dihentikan penggunaannya agar selanjutnya dapat dilakukan Usulan Penghapusan dari Pengguna Barang. Sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Biro Umum menginformasikan daftar BMN dengan total Nilai Perolehan sebesar Rp3.937.785.727,00 yang diusulkan penghentian penggunaannya, sebagai bahan pertimbangan Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian dalam menetapkan persetujuan penghentian penggunaan untuk 991 unit BMN tersebut.										
							5. ND Nomor BM.03.11/207/SES.MEKON/11/2024 tanggal 26 November 2024 dari Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian kepada Pjt Kepala Biro Umum perihal Persetujuan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara dimana dalam salah satu pokok Nota Dinas menyatakan bahwa guna terbit administrasi, Nota Dinas Persetujuan Penghentian Penggunaan BMN ini agar dapat digunakan sebagai dasar administrasi pada Sistem Akuntansi Instansi, serta salah satu dokumen pendukung dalam pengusulan penghapusan terhadap 991 unit BMN.										
Jumlah		3	82.433.777,00	Jumlah	4	82.433.777,00	Jumlah	3	82.433.777,00	1	-	0	0,00	0	0,00		82.433.777,00

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENKO PEREKONOMIAN TA 2022

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah			
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah						
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai							
1								9	10	0,00	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Plafon Selasar Lantai 3 Gedung Ali Wardhana Kemnko Perekonomian Sebesar Rp27.000.000,00	1	0,00	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemnko Perekonomian agar memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum atas ketidakecermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas tagihan dan menguji kelengkapan serta kebenaran materil dokumen tagihan.	1	0,00	Tindak Lanjut Semester II 2023 Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas nomor KU.05.01/196/ SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a) Memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum atas ketidakecermatannya. b) Memerintahkan PPK Biro Umum untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas tagihan dan menguji kelengkapan serta kebenaran materil dokumen tagihan. Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembinaan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum melalui Nota Dinas nomor PW.05.02/06/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas tagihan dan menguji kelengkapan serta kebenaran materil dokumen tagihan. PPK telah melakukan penyetoran nomor NTPN 04E0855DF02639L5 dengan nilai sebesar Rp 27.000.000,00 tanggal 15 Mei 2023.	1		0,00								Tindak lanjut diusulkan untuk status sesuai dengan rekomendasi		
							Tindak Lanjut Semester I 2024 Entitas menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyampaikan Surat teguran Nomor: PW.05.02/182.3/SES.M.EKON/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 dari Sesmenko Perekonomian kepada PPK Biro Umum TA 2022 agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas tagihan dan menguji kelengkapan serta kebenaran materil dokumen tagihan dengan tembusan kepada Inspektur dan Ketua Tim Kerja Manajemen SDM													
2	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun 2022 Sebesar Rp11.155.394,70	1	11.155.394,70	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemnko Perekonomian agar : a. Memberikan pembinaan kepada Petugas Pengadministrasian Kepegawaian atas ketidakecermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan Tukin	1	0,00	TL Semester II 2023: Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas nomor KU.05.01/197/SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a) Memberikan pembinaan kepada Petugas Pengadministrasian Kepegawaian atas ketidakecermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan Tukin, dan b) Memerintahkan PPK untuk melakukan pengahutan dan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.155.394,70 Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan embinan melalui kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Pegawai melalui Nota Dinas nomor PW.05.02/07/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan Tunjangan Kinerja dan melakukan penyetoran ke kas negara sebesarRp 11.155.394,70.	1		0,00								Tindak lanjut diusulkan untuk status sesuai dengan rekomendasi		
							Tindak Lanjut Semester I 2024 Entitas menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyampaikan Surat teguran Nomor: PW.05.02/182.3/SES.M.EKON/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 dari Sesmenko Perekonomian kepada PPK Biro Umum TA 2022 agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas tagihan dan menguji kelengkapan serta kebenaran materil dokumen tagihan dengan tembusan kepada Inspektur dan Ketua Tim Kerja Manajemen SDM													
				b. Memerintahkan PPK untuk melakukan pengahutan dan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.155.394,70.	1	11.155.394,70	TL Semester II 2023 PPK Belanja Pegawai telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan nomor NTPN sebagai berikut: 1. 37B1F1JNFMAR07JIN sebesar Rp2.734.000,00 tanggal 03 Desember 2023 2. CD0FC55DF8VTTFIL sebesar Rp2.734.000,00 tanggal 09 Januari 2024 3. 230FB3C1FB9ESSOR sebesar Rp78.739,00 tanggal 19 September 2023 4. F61B20N9VR19LSU4 sebesar Rp62.336,00 tanggal 19 September 2023 5. 76F116L8ELJOGSFB sebesar Rp2.734.000,00 tanggal 21 September 2023 6. D8EB10N9VRKRKJNU sebesar Rp2.734.000,00 tanggal 09 Oktober 2023 7. 6FB87QLUG1SUDBE sebesar Rp78.320,00 tanggal 07 Agustus 2023 Total penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.155.395,000 Catatan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena terdapat penyetoran pada tahun 2024 (CD0FC55DF8VTTFIL sebesar Rp 2.734.000,00 tanggal 09 Januari 2024)	0		8.421.394,70										11.155.394,70
							TL Semester I 2024 PPK Belanja Pegawai telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan nomor NTPN CD0FC55DF8VTTFIL sebesar Rp2.734.000,00 tanggal 09 Januari 2024	1		2.734.000,00								Tindak lanjut diusulkan untuk status sesuai dengan rekomendasi		
3	Kewajiban Pada Kontrak PPNPN Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan, Terdapat Iuran BPJS Ketenagakerjaan PPNPN Pengemudi Pada Biro Umum yang Belum Dibayarkan Sebesar Rp5.513.822,00 dan Belum Seluruh PPNPN Berstatus Kepesertaan BPJS Kesehatan Aktif	1	5.513.822,00	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemnko Perekonomian agar : a. Memerintahkan PPK pada masing-masing unit kerja mempedomani SE KPA Kemnko Perekonomian tentang Tenaga Pendukung di Lingkungan Kemnko Perekonomian dalam menyusun kontrak PPNPN	1	0,00	TL Semester II 2023 Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas nomor KU.05.01/198/ SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a)Memerintahkan PPK pada masing-masing unit kerja mempedomani SE KPA Kemnko Perekonomian tentang Tenaga Pendukung di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyusun kontrak PPNPN; b)Memerintahkan PPK Biro Umum untuk menarik dan menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi sebesar Rp5.513.822,00; dan c)Memerintahkan PPK Biro Umum, Biro Perencanaan, Biro Lintas Sektoral, Deputi 4, Deputi 6, dan Deputi 7 mengikuti SE KPA Kemnko Perekonomian terkait kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Tenaga Pendukung PPNPN di lingkungan Kemnko Perekonomian. Catatan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum terdapat bukti kontrak PPNPN terbaru yang mempedomani SE KPA Kemnko				1		0,00						Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi	0,00
				b. Memerintahkan PPK Biro Umum untuk menarik dan menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi sebesar Rp5.513.822,00;	1	5.513.822,00	TL Semester II 2023 PPK telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan nomor NTPN 215F70N9VRHTUJGS dengan nilai sebesar Rp5.513.822,00 tanggal 07 September 2023.	1		5.513.822,00								Tindak lanjut sesuai rekomendasi	5.513.822,00	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas regional/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
				b. Menginstruksikan kepada masing-masing PPK terkait agar berkoordinasi dengan PPBJ dalam upaya menghasilkan harga sewa laptop yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.	1	0,00	TL Semester II 2023: Menindaklanjuti Nota Dinas nomor KU.05.01/200/SES.M.EKON/08/2023, Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Nota Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum, PPK Deputy II, dan PPK Deputy IV melalui Nota Dinas nomor PW.05.02/03/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dalam upaya menghasilkan harga sewa laptop yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.	1	0,00					Tindak lanjut diselesaikan untuk status sesuai dengan rekomendasi			
							TL Semester I 2024 Entitas menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyampaikan notula Konsinyering Pengelolaan BMN tanggal 26 Oktober 2023 yang membahas isu krusial terkait lebih banyak pemenuhan kebutuhan melalui mekanisme sewa yang belum diharuskan berupa Produk Dalam Negeri (PDN), pengadaan spesifikasi barang yang tidak seragam, dan rendahnya efisiensi pemenuhan kebutuhan pada pegawai (pegawai yang telah memiliki tanggungjawab atas BMN masih diberikan barang sewa, sehingga mengakibatkan penggunaan yang ganda) karena tidak termasuk kedalam Rencana Kebutuhan BMN Berdasarkan LHP atas LK Kemenko Perekonomian TA 2023 Nomor 18.b/LHP/XV/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 diketahui bahwa tidak terdapat permasalahan terkait harga sewa laptop										
	Jumlah	5	160.025.066,70	Jumlah	10	160.025.066,70	Jumlah	9	160.025.066,70	1	0,00	0	0,00	0	0,00	160.025.066,70	

HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENKO PEREKONOMIAN TA 2021

[illegible]

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
				b. Menegur PPK terkait agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan;	1	0,00	Tindak Lanjut Semester II 2022 Sesmenko Bidang Perencanaan melalui surat nomor KU.5.1-848/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 menginstruksikan agar KPA melakukan pembinaan kepada PPK terkait agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan. Kepala Biro Umum selaku KPA melalui surat nomor KU.5.1500/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 September 2022 menginstruksikan PPK KPPiP dan PPK Biro KLIP agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan.										
							Tindak Lanjut Semester I 2023 Surat Nomor HM-180/SET.M.EKON.3/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 mengenai permintaan pengadaan jasa konsultasi perorangan TA 2023 ND No.47/PPK.KEG.4538/TA/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 dari PPK Kegiatan 4538 kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa terkait Permintaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perorangan disertai dengan HPS dan KAK										
							Tindak Lanjut Semester I 2024 Entitas menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyampaikan: 1) Surat Teguran Nomor PW.05.02/180.1/SES.M.EKON/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 dari Sesmenko Bidang Perencanaan kepada PPK Biro KLIP TA 2021 agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan dengan tembusan kepada Inspektur dan Ketua Tim Kerja Manajemen SDM; dan 2) Surat Teguran Nomor PW.05.02/181.1/SES.M.EKON/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 dari Sesmenko Bidang Perencanaan kepada PPK KPPiP TA 2021 agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan dengan tembusan kepada Inspektur dan Ketua Tim Kerja Manajemen SDM	1	0,00						Tindak lanjut diusulkan untuk status sesuai dengan rekomendasi		
				c. Menyusun peraturan terkait besaran standar remunerasi/penghasilan untuk belanja jasa konsultasi perorangan.	1	0,00	Tindak Lanjut Semester II 2022 Sesmenko Bidang Perencanaan mengintruksikan kepada Kepala Biro Perencanaan melalui surat nomor KU.5.1847/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 untuk menyusun peraturan terkait besaran standar remunerasi/penghasilan untuk belanja jasa konsultasi perorangan.	1	0,00						Tindak lanjut sesuai rekomendasi		
							Tindak Lanjut Semester I 2023 Undangan Rapat Pembahasan TL LHP BPK terkait besaran standar remunerasi penghasilan untuk Belanja Jasa Konsultan Perorangan No.PR.4.1/94/SET.M.EKON.1/12/2022 tanggal 2 Desember 2022 dari Kepala Biro Umum Kemenko Perencanaan kepada Direktur Anggaran. Bidang perencanaan dan Kemaritiman, Direktur Sistem Penganggaran dari Kementerian Keuangan dan Inspektur, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan persidangan, Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, Sekretariat komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Kelompok Substansi Keuangan dan Kelompok Substansi program dan Anggaran dari Kemenko Bidang Perencanaan. Telah diperoleh notulen rapat pembahasan pada tanggal 7 Desember 2022 terkait standar remunerasi/penghasilan untuk belanja jasa konsultan perorangan yang dipimpin oleh Plt Kepala Biro Perencanaan dan diikuti oleh Staf dari Direktorat Jenderal Anggaran, Inspektorat Kemenko Perencanaan, Kasubag Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran, Analisis Perencana Anggaran, pengelola Anggaran dan Pengadministrasi Anggaran Kemenko Perencanaan dengan Notulen Rapat terlampir.										
							Tindak Lanjut Semester II 2023 Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perencanaan telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Standar Remunerasi Untuk Jasa Konsultasi Perorangan Selain Konstruksi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2023.										
3	Belanja Sewa Peralatan Kantor sebesar Rp610.087.200,00 Tidak Efisien dan Terdapat Kelebihan Bayar sebesar Rp2.160.000,00	1	2.160.000,00	BPK merekomendasikan agar Menteri Koordinator Bidang Perencanaan melalui Sesmenko Bidang Perencanaan untuk memerintahkan Kepala Biro Umum untuk: a. Menginstruksikan PPK Deputi 4 menagih kelebihan pembayaran belanja sewa sebesar Rp2.160.000,00 serta lebih cermat dalam menyusun HPS belanja sewa peralatan kantor	1	2.160.000,00	Tindak Lanjut Semester II 2022 Sesmenko Bidang Perencanaan telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku KPA melalui surat No. KU.5.1-849/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar menginstruksikan PPK Deputi 4 menagih kelebihan pembayaran belanja sewa sebesar Rp2.160.000,00 serta lebih cermat dalam menyusun HPS belanja sewa peralatan kantor. Kepala Biro Umum selaku KPA mengintruksikan kepada PPK D.IV melalui surat No. KU.5.1501/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 September 2022 untuk menagih kelebihan pembayaran belanja sewa senilai Rp2.160.000,00 serta lebih cermat dalam menyusun HPS belanja sewa peralatan kantor. Telah diperoleh Bukti pengembalian senilai Rp2.160.000,00 dengan NTPN 7C24B2G4V712GBOQ tanggal 19 Mei 2022 dan dokumen penyusunan HPS pengadaan Laptop dari Pejabat Pembuat Komitmen Deputi IV		2.160.000,00						2.160.000,00		
							Tindak Lanjut Semester I 2023 Tidak ada dokumen tindak lanjut baru pada semester I 2023 Telah dicek pengujian pemeriksaan LK TA 2022 dan tidak ditemukan temuan berulang pada Deputi 4 terkait belanja sewa peralatan kantor. Pada pemeriksaan LK Tahun 2022, ditemukan permasalahan belanja sewa pada Deputi 1, 2, 5, 7 dan Sekretariat Kementerian dan penyebabnya bukan terkait HPS melainkan terkait koordinasi	1	0,00							Tindak lanjut sesuai rekomendasi	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
				b. Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran belanja barang dan belanja modal di satuan kerjanya.	1	0,00	Tindak Lanjut Semester II 2022 Sesmenko Bidang Perencanaan telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku KPA melalui surat No. KU.5.1-849/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar lebih cermat dalam merencanakan penganggaran belanja barang dan belanja modal di satuan kerjanya.										
							Tindak Lanjut Semester I 2023 Laporan Reviu RKAKL pada Deputi 1-7 dan Sekretariat Kementerian										
							Tindak Lanjut Semester I 2024 Entitas menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyampaikan Surat permintaan reviu RKA-K/L TA 2024 dari PIt. Kepala Biro Umum kepada APIP untuk melakukan reviu kepada APIP sesuai ND Nomor: PW.05.02/252/SET.M.EKON/4/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023	1	0,00						Tindak lanjut diusulkan untuk status sesuai dengan rekomendasi		
4	Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Lainnya Kegiatan Media Placement pada Biro Perencanaan sebesar Rp33.810.000,00	1	33.810.000,00	BPK merekomendasikan agar Menteri Koordinator Bidang Perencanaan melalui Sesmenko Bidang Perencanaan memerintahkan kepada Kepala Biro Perencanaan untuk: a. Menginstruksikan PPK untuk menagih kelebihan pembayaran atas belanja jasa lainnya kegiatan media placement sebesar Rp33.810.000,00 serta cermat dalam melakukan penelitian dan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penagihan	1	33.810.000,00	Tindak Lanjut Semester II 2022 Sesmenko Bidang Perencanaan telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku KPA melalui surat No. KU.5.1-850/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar menginstruksikan PPK Biro Perencanaan untuk menagih kepada penyedia jasa atas kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya kegiatan media placement sebesar Rp33.810.000,00 serta agar lebih cermat dalam melakukan penelitian dan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penagihan. Kepala Biro Umum selaku KPA mengintruksikan kepada PPK Biro Perencanaan melalui surat Nomor KU.5.1502/SET.M.EKON/4/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar menginstruksikan kepada penyedia jasa terkait atas kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya kegiatan media placement sebesar Rp33.810.000,00, serta agar lebih cermat dalam melakukan penelitian dan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penagihan.		33.810.000,00							33.810.000,00	
							Telah diperoleh Bukti pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya kegiatan <i>media placement</i> senilai Rp33.810.000,00 dengan NTPN ABB962G4V7414R00 pada tanggal 20 September 2022. Telah diperoleh dokumen/bukti Pengadaan Jasa Lainnya berupa kerja sama dengan Media Massa Nasional Kompas dalam bentuk SPP dan kelengkapannya, serta salinan tayang di media Kompas pada tanggal 18 Maret 2022.										
							Tindak Lanjut Semester I 2023: Berdasarkan pengujian pada saat pemeriksaan LK TA 2022, tidak terjadi permasalahan berulang pada Biro Perencanaan khususnya pada kegiatan Belanja Jasa Lainnya Kegiatan Media Placement	1	0,00							Tindak lanjut sesuai rekomendasi	
				b. Menyusun pedoman berdasarkan ketentuan yang berlaku atas kegiatan publikasi khususnya <i>media placement</i>	1	0,00	Tindak Lanjut Semester II 2022 Sesmenko Bidang Perencanaan telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan (KLIP) melalui surat No. KU.5.1851/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar menyusun pedoman berdasarkan ketentuan yang berlaku atas kegiatan publikasi khususnya <i>media placement</i> Informasi dari Kemenko Perencanaan diketahui bahwa pedoman kegiatan publikasi saat ini dalam proses legal drafting.										
							Tindak Lanjut Semester I 2023 Surat Edaran Nomor SE-20/SES.M.EKON/12/2022 tentang Alur Pelaksanaan Publikasi Konten Melalui Kerjasama Media di Lingkungan Kemenko Bidang Perencanaan yang ditetapkan oleh Sesmenko Bidang Perencanaan pada tanggal 30 Des 2022. Telah diperoleh dokumen pedoman kegiatan publikasi khususnya media placement	1	0,00							Tindak lanjut sesuai rekomendasi	
5	Terdapat Lebih Bayar atas Realisasi Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp25.690.000,00 atas Pengadaan Jasa Professional Conference Organizer (PCO) Presidensi G20 Indonesia.	1	25.690.000,00	BPK merekomendasikan agar Menteri Koordinator Bidang Perencanaan melalui Sesmenko Bidang Perencanaan memerintahkan Kepala Biro Umum untuk: a. Menginstruksikan PPK Deputi 7 untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas Belanja Jasa Lainnya dan menagih kelebihan pembayaran atas jasa tenaga medis antigen kru dan driver sebesar Rp25.690.000,00	1	25.690.000,00	Tindak Lanjut Semester II 2022 Sudah disorotkan ke kas negara No NTPN F32027QLU6FOLD8D8 nilai Rp25.690.000,00. Nilai sudah sesuai dan telah dicek di portal cauditi (terlampir)		25.690.000,00							25.690.000,00	
							Tindak Lanjut Semester I 2023 Tidak ada dokumen tindak lanjut baru pada semester I 2023. Berdasarkan pemeriksaan LK TA 2022 tidak ditemukan permasalahan terkait belanja jasa lainnya pada Deputi 7	1	0,00							Tindak lanjut sesuai rekomendasi	

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah						
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
				b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan di satuan kerjanya.	1		0,00	Tindak Lanjut Semester II 2022 a. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KU.5.1- 852/SES.M.EKON/06/2022) agar: - lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap Belanja Jasa Lainnya dan menagih kepada penyedia jasa terkait atas kelebihan pembayaran atas jasa tenaga medis antigen kru dan driver sebesar Rp25.690.000,00; dan - Lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran. b. Surat Kepala Biro Umum kepada PPK Kedeputian VII (Nomor KU.5. 1-503 /SET.M.EKON.4/06/2022) agar: - lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap Belanja Jasa Lainnya dan menagih kepada penyedia jasa terkait atas kelebihan pembayaran atas jasa tenaga medis antigen kru dan driver sebesar Rp25.690.000,00; dan - Lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran.												
								Tindak Lanjut Semester I 2023 a. ND Nomor ND-23/D.VIII.M.EKON.5.PPK.2513/11/2022 tanggal 2 Nov 2002 dari PPK Kegiatan 2513 Kepada Inspektur Kemenko Perekonomian terkait Permohonan Reviu atas Dokumen Penagihan Belanja Pengadaan PCO Pertemuan 3 Sherpa G20 b. ND Nomor ND-27/D.VII.M.Ekon.5.PPK.2513/11/2022 tanggal 12 November 2022 dari PPK Kegiatan 2513 kepada Inspektur Kemenko Perekonomian terkait Permohonan Reviu atas Dokumen Penagihan Belanja Pengadaan PCO Pertemuan 4 Sherpa G20 c. ND Nomor ND-15/D.VIII.M.Ekon.5.PPK.2513/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 dari PPK Kegiatan 2513 kepada Inspektur Kemenko Perekonomian terkait Permohonan Reviu atas Dokumen Penagihan Belanja Pengadaan PCO Pertemuan 2 Sherpa G20 d. ND Nomor ND-17/D.VII.M.Ekon.5.PPK.2513/11/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dari PPK Kegiatan 2513 kepada Inspektur Kemenko Perekonomian terkait Permohonan Reviu atas Dokumen Penagihan Belanja Pengadaan PCO Pertemuan 3 Sherpa G20 e. Laporan Pendampingan Pelaksanaan Kontrak PCO Pertemuan Ke-3 Sherpa PW.06.7/27.A/Ins.M.Ekon/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 f. Laporan Hasil Reviu Dokumen Pertanggungjawaban Pengadaan Jasa Lainnya Pertemuan Ke-4 Sherpa G20 tanggal 16 Des 2022 g. Laporan Pendampingan Pelaksanaan Kontrak PCO 2 PW.06.07/16/INS.M.EKON/07/2022 tanggal 15 Juni 2022 h. Laporan Hasil Reviu Dokumen Pertanggungjawaban Pengadaan Jasa Lainnya Pertemuan Ke-2 Sherpa G-20 Nomor PW.06.07/25/INS.M.EKON.09/2022 tanggal 15 Sep 2022 i. Laporan Hasil Reviu Dokumen Pertanggungjawaban Pengadaan Jasa Lainnya Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 PW.06.07/44/INS.M.EKON/11/2022 tanggal 16 Nov 2022 j. Laporan Pendampingan Pelaksanaan Kontrak PCO Pertemuan Ke-4 Sherpa G20 PW.06.07/44.B/INS.M.EKON/11/2022 tanggal 21 November 2022	1		0,00								Tindak lanjut sesuai rekomendasi	
6	Terdapat Indikasi Pemecahan Kontrak atas Beberapa Paket Belanja Modal pada Biro Umum sebesar Rp4.179.105.810,00	1	123.907.500,00	BPK merekomendasikan agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memerintahkan Kepala Biro Umum untuk: a. Menegur PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan	1		0,00	Tindak Lanjut Semester II 2022 a. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KU.5.1- 853/SES.M.EKON/06/2022), perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK TA 2021, yang meminta Kepala Biro Umum untuk diantaranya: - Memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan; dan												
								Tindak Lanjut Semester I 2023 Surat Teguran Tertulis dari Kepala Biro Umum kepada PPK Biro Umum Nomor PW.05.02/538/SET.M.EKON.4/07/2023 tanggal 10 Juli 2023												
								Tindak Lanjut Semester I 2024 Entitas menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyampaikan Surat teguran Nomor: PW.05.02/118/SET.M.EKON.4/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari Ph. Kepala Biro Umum kepada PPK Biro Umum TA 2021 agar lebih cermat dalam menyusun HPS serta tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan dengan tembusan kepada Inspektur dan Ketua Tim Kerja Manajemen SDM	1		0,00							Tindak lanjut diusulkan untuk status sesuai dengan rekomendasi		
				b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan di satuan kerjanya	1		0,00	Tindak Lanjut Semester II 2022 a. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KU.5.1- 853/SES.M.EKON/06/2022), perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK TA 2021, yang meminta Kepala Biro Umum untuk diantaranya: - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan di satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Surat Kepala Biro Umum kepada PPK Biro Umum (Nomor KU.5. 1-504 /SET.M.EKON.4/06/2022): - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan di satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan; dan - Menginstruksikan PPK Biro Umum untuk menyampaikan penjelasan dan bukti pendukung pertanggungjawaban kepada pihak Inspektorat atas selisih harga pengadaan barang sebesar Rp123.907.500,00			1		0,00					Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi		

[illegible]

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
							Tindak Lanjut Semester I 2024 Entitas menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyampaikan Surat teguran Nomor: PW.05.02/182.1/SES.M.EKON/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 dari Sesmenko Perencanaan kepada Kepala Biro Umum TA 2021 agar lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan tembusan kepada Inspektur dan Ketua Tim Kerja Manajemen SDM	1	0,00							Tindak lanjut diusulkan untuk status sesuai dengan rekomendasi	0,00
	Jumlah	7	261.166.500,00	Jumlah	17	185.567.500,00	Jumlah	14	185.567.500,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00		139.634.000,00



DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO

NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
1	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4540	ABA	001	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur	290.316.000	216.408.961	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	34	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	30	100
2	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7706	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi	297.805.000	206.742.758	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	66	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	60	100
3	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2499	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan Retail dan Pemanfaatan Pasar Dalam Negeri	577.579.000	370.551.192	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	59	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	59	100
4	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2491	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital	292.584.000	82.234.000	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	56	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
5	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7707	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Mineral	882.196.000	415.759.148	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	45	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	40	100
6	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4542	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur dan Agro	463.794.000	293.334.945	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	64	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
7	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	5032	ABA	001	Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	11.011.808.000	7.248.921.227	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
8	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4543	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan	568.725.000	361.652.795	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	53	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	53	100
9	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2493	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi	5.603.534.000	358.234.754	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPh

NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
10	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7701	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Pariwisata	574.518.000	262.133.564	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	68.5	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
11	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2513	ABA	001	Rekomendasi Penyusunan Kesepakatan pada Level Teknis untuk Tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan di Forum Ekonomi Multilateral	222.846.000	87.692.838	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	39	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	39	100
12	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4546	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Usaha yang Berdaya Saing	539.131.000	380.724.682	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	49	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	40	100
13	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2510	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Bilataeral	576.928.000	405.614.081	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	50	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
14	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7709	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Biofuel	607.949.000	298.746.586	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	57	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	57	100
15	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2514	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional	712.238.000	568.381.320	N	3	Rekomendasi Kebijakan	1	51	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	30	100
16	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4541	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata	517.926.000	222.283.596	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	55	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
17	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4544	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi	371.729.000	252.042.608	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	86	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
18	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7708	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Dekarbonisasi dan Penguatan Sistem Ketenagalistrikan	642.827.000	338.937.915	N	2	Rekomendasi Kebijakan	2	49.8	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	1	49.8	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPh

NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
19	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7710	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi	322.294.000	193.486.017	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	68	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	68	100
20	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2492	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal	520.780.000	211.318.538	N	4	Rekomendasi Kebijakan	2	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	1	49.98	100
21	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7710	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Alumina	280.773.000	67.757.400	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	60.33	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	60	100
22	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2513	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Implementasi Proyek Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Asia Zero Emission Community (AZEC)	481.319.000	369.431.578	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	45	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	45	100
23	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2510	ABA	002	Rekomendasi Persiapan Forum Bilateral	1.553.584.000	1.401.307.000	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	50	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
24	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4541	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi	513.563.000	251.258.877	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	54	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
25	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7709	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan	668.304.000	298.756.017	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	66	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	32	100
26	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4546	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Hilirisasi selain Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	427.826.000	220.658.400	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	42	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	40	100
27	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4540	ABA	002	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Logistik	713.892.000	391.462.742	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	47	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	41	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPh

NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
28	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7708	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Geologi	552.365.000	222.972.951	N	2	Rekomendasi Kebijakan	2	49.8	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	1	49.8	100
29	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2499	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk	596.069.000	207.064.993	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
30	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	5032	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syariah	5.871.684.000	0	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
31	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4543	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bullion	254.610.000	115.741.635	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
32	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4542	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan BUMN Bidang Farmasi dan Kesehatan	454.546.000	221.537.469	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	60	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	45	100
33	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7707	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Pengelolaan Batubara	613.608.000	215.047.819	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	44	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	40	100
34	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2492	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Fiskal	642.049.000	70.528.000	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
35	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4544	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Sumber Daya Mineral	281.600.000	87.595.125	N	1	Rekomendasi Kebijakan	1	50	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
36	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7706	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi	589.949.000	238.963.037	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	66	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	60	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPh

NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
37	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2514	ABA	002	Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Internasional	638.007.000	210.229.111	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
38	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2493	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Hubungan Diplomasi Strategis	7.274.486.000	6.072.291.744	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
39	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7701	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan dan Tata Kelola Dana Pariwisata Berkualitas	620.587.000	0	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
40	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2514	ABA	003	Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Internasional	67.128.000	12.255.000	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
41	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2510	ABA	003	Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Bilateral	205.395.000	192.774.175	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	46	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	25	100
42	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2493	ABA	003	Rekomendasi Kebijakan Paket dan Stimulus Ekonomi	14.159.312.000	2.589.972.293	N	3	Rekomendasi Kebijakan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
43	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7708	ABA	003	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup mendukung Ketahanan Energi Nasional	203.588.000	87.414.364	N	1	Rekomendasi Kebijakan	1	49.83	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.8	100
44	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4540	ABA	003	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Transit Oriented Development	276.328.000	130.678.373	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	45	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	44	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
45	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2499	ABA	003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pasar Dalam Negeri	285.499.000	175.500.301	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	50	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
46	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7707	ABA	003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara	289.548.000	60.738.500	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	45	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	40	100
47	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4546	ABA	003	Rekomendasi Kebijakan Pengintegrasian Sistem Perizinan dan Penyelesaian Masalah yang Terkait Perizinan	533.305.000	309.149.366	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	11	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	10	100
48	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4544	ABA	003	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Smelter Grade Alumina	291.075.000	124.202.237	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
49	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7709	ABA	003	Rekomendasi Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon	479.355.000	267.454.608	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	72	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	41	100
50	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7706	ABA	003	Rekomendasi Kebijakan dalam Koordinasi Pembangunan Fasilitas Pendukung Minyak dan Gas Bumi	299.015.000	135.089.766	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	66	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	60	100
51	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4543	ABA	003	Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bisnis	269.857.000	136.863.063	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	53	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	53	100
52	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7706	ABA	004	Rekomendasi Kebijakan terkait Regulasi Perpajakan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	317.307.000	31.895.961	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	66	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	60	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPh

NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
53	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4543	ABA	004	Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	518.659.000	288.321.161	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	53	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	53	100
54	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	5032	ABA	004	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan	6.291.520.000	340.000	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
55	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2514	ABA	004	Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Ketua/Tuan Rumah dalam Forum Regional	2.481.450.000	22.871.751	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	76	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	75	100
56	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4544	ABA	004	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kilang Bioethanol	289.820.000	125.004.854	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	43	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	43	100
57	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4544	ABA	005	Rekomendasi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tepat Sasaran	290.915.000	175.258.674	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	35	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	35	100
58	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2521	ABB	001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan	434.119.000	215.984.548	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	44	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	41	100
59	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2521	ABB	002	Rekomendasi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)	507.668.000	192.135.414	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
60	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2521	ABB	003	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	592.120.000	205.140.000	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	99.2	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	99	100
61	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	5266	ABF	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (Kawasan Industri, KPBPB, KSPN)	582.854.000	280.289.369	N	3	Rekomendasi Kebijakan	2	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	1	50	100



NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
62	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	5266	ABF	002	Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021	572.396.000	131.376.000	N	3	Rekomendasi Kebijakan	1	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	1	50	100
63	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7702	ABK	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	574.840.000	400.552.826	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	50	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
64	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2519	ABK	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro	289.220.000	87.609.819	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
65	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2519	ABK	002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Kimia dan Farmasi serta Pengolahan Bahan Galian Non Logam	566.830.000	108.343.500	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	50.99	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
66	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2519	ABK	003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Tekstil, Produk Tekstil dan Alas Kaki	289.220.000	87.934.445	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
67	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6921	ABP	001	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	935.397.000	469.089.269	N	3	Rekomendasi Kebijakan	0	64.11	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	63.1	100
68	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6920	ABP	001	Rekomendasi Pengawasan Internal	289.703.000	88.143.204	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	65.14	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	65.02	100



NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
69	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6922	ABP	001	Rekomendasi Kebijakan Kemudahan Perizinan Berusaha di KEK dan Promosi Investasi	840.519.000	389.701.844	N	4	Rekomendasi Kebijakan	0	63.79	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	61.42	100
70	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6924	ABP	001	Rekomendasi terkait Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.133.529.000	65.376.638	N	4	Rekomendasi Kebijakan	0	32.5	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	32	100
71	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6921	ABP	002	Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis KEK	1.211.977.000	389.631.641	N	4	Rekomendasi Kebijakan	0	58.88	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	58.07	100
72	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6920	ABP	002	Rekomendasi Kebijakan Program dan Anggaran	372.558.000	62.168.649	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	64.57	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	64.33	100
73	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6924	ABP	002	Rekomendasi terkait Penataan Organisasi dan Tata Laksana	326.437.000	2.282.000	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	20.5	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	20	100
74	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6920	ABP	003	Rekomendasi Pengembangan Kebijakan Strategis Pengembangan KEK	642.549.000	136.385.625	N	3	Rekomendasi Kebijakan	0	65.06	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	64.89	100
75	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6924	ABP	003	Rekomendasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	612.748.000	86.216.392	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	32.5	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	32	100
76	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6920	ABP	004	Rekomendasi Usulan Pembentukan KEK	785.080.000	69.094.034	N	3	Rekomendasi Kebijakan	0	50.99	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100



NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
77	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	BAH	001	Pelayanan Investasi Administrator KEK Kendal	397.507.000	67.395.381	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
78	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	BAH	002	Pelayanan Investasi Administrator KEK Mandalika	359.951.000	125.539.222	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
79	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	BAH	003	Pelayanan Investasi Administrator KEK Lido	298.864.000	89.059.588	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
80	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	BAH	004	Pelayanan Investasi Administrator KEK Industropolis Batang	310.982.000	60.038.964	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
81	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	BAH	005	Pelayanan Investasi Administrator KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali	339.846.000	148.480.721	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
82	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	BAH	006	Pelayanan Investasi Administrator KEK Tanjung Sauh	184.724.000	23.153.512	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
83	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	BAH	007	Pelayanan Investasi Administrator KEK Setangga	172.628.000	55.163.149	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
84	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	BAH	008	Pelayanan Investasi Administrator KEK ETKI Banten	228.309.000	30.470.100	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100



NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
85	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	BAH	009	Pelayanan Investasi Administrator KEK Lainnya	519.750.000	7.534.635	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
86	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4539	CCL	001	Layanan Sarana Sistem Informasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)	15.000.000	9.478.290	N	1	Unit	0	49	terkonfirmasi	00 - VALID	1	1	Maximize	Time Efficiency	0	49	100
87	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7703	EBA	001	Layanan Koordinasi Program, Tata Kelola dan Dukungan Administrasi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	1.151.833.000	866.722.625	N	1	Layanan	0	49.95	terkonfirmasi	00 - VALID	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.8	100
88	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7711	EBA	001	Layanan Koordinasi Program, Tata Kelola dan Dukungan Administrasi di Lingkungan DeputiBidang Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.206.638.000	724.696.143	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
89	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7712	EBA	001	Layanan Koordinasi Program, Tata Kelola dan Dukungan Administrasi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	1.141.666.000	475.407.582	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
90	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7704	EBA	001	Layanan Koordinasi Program, Tata Kelola dan Dukungan Administrasi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	739.860.000	436.073.570	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100



NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
91	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2503	EBA	001	Layanan Koordinasi Program, Tata Kelola dan Dukungan Administrasi di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	1.192.907.000	592.455.704	N	2	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
92	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7711	EBA	002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kebijakan Energi Dan Sumber Daya Minerali	1.306.976.000	238.414.625	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
93	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7704	EBA	002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	1.528.522.000	865.695.595	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
94	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7712	EBA	002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	2.767.753.000	1.918.872.072	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
95	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2503	EBA	002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	1.140.844.000	555.057.938	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
96	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7703	EBA	002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	1.096.072.000	733.811.004	N	1	Layanan	0	49.95	terkonfirmasi	00 - VALID	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.8	100
97	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4542	PBA	001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	925.740.000	362.622.776	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	47	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	47	100
98	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2500	PBA	001	Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional	1.497.852.000	708.508.360	N	4	Rekomendasi Kebijakan	2	92	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	89	100



NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
99	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2491	PBA	001	Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030	2.339.701.000	1.154.815.064	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	49.99	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
100	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4541	PBA	001	Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	841.854.000	292.078.457	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	32	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	32	100
Total Nilai Jumlah Output																								15.200 152	



DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO

NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
101	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7710	PBA	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Nikel	886.104.000	137.714.100	N	4	Rekomendasi Kebijakan	0	28	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	28	100
102	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4539	PBA	001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	1.503.209.000	764.610.563	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	49	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	48	100
103	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2513	PBA	001	Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Indonesia ke OECD	6.694.514.000	204.519.562	N	3	Rekomendasi Kebijakan	0	27	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	27	100
104	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7701	PBA	003	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan	876.137.000	218.892.185	N	3	Rekomendasi Kebijakan	2	53.33	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	1	49.98	100
105	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	5266	PBF	001	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	9.697.252.000	4.737.734.655	N	2	Rekomendasi Kebijakan	1	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	1	50	100
106	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4550	PBK	001	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	3.148.053.000	1.065.086.069	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
107	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4545	PBK	001	Rekomendasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	817.663.000	293.152.096	N	1	Rekomendasi Kebijakan	1	58.99	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
108	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7702	PBK	001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor	856.972.000	117.282.080	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
109	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	7702	PBK	002	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri Besi dan Baja	602.044.000	165.769.614	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPh

NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
110	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	4545	PBK	002	Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1.105.353.000	226.548.284	N	3	Rekomendasi Kebijakan	1	50	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
111	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	CL	2519	PBK	002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor	866.085.000	493.152.849	N	1	Rekomendasi Kebijakan	1	50	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	50	100
112	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6922	PBP	001	Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe	319.868.000	36.426.816	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	28.25	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	28	100
113	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6922	PBP	002	Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Galang Batang	318.689.000	49.196.210	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	28.37	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	28	100
114	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6922	PBP	003	Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Gresik	318.717.000	122.982.863	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	40.43	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	28	100
115	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6922	PBP	004	Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Sei Mangkei	313.892.000	1.758.500	N	1	Rekomendasi Kebijakan	0	29.25	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	28	100
116	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	QAH	001	Pelayanan Investasi Administrator KEK Sei Mangkei	433.803.000	130.342.598	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100



NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
117	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	QAH	002	Pelayanan Investasi Administrator KEK Galang Batang	512.538.000	87.940.044	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
118	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	QAH	003	Pelayanan Investasi Administrator KEK Gresik	496.368.000	155.621.608	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
119	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	CL	6923	QAH	004	Pelayanan Investasi Administrator KEK Arun Lhokseumawe	537.414.000	70.312.639	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
120	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2490	ABA	001	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi	799.713.000	212.960.673	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
121	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2486	ABA	001	Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian	829.327.000	117.480.485	N	4	Rekomendasi Kebijakan	0	34.66	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	33	100
122	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2490	ABA	002	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa	803.086.000	265.607.554	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
123	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2490	ABA	003	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Transformasi Digital	828.532.000	0	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100



NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
124	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2490	ABA	004	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pembangunan Daerah	833.332.000	194.811.982	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
125	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2490	ABA	005	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi	828.532.000	45.895.000	N	2	Rekomendasi Kebijakan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
126	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	4538	BMB	003	Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi	4.802.597.000	2.629.750.771	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
127	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	4538	BMB	958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	764.307.000	416.801.059	N	1	layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
128	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2486	CCL	001	Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	7.000.000.000	1.305.555.550	N	2	Unit	0	26.66	terkonfirmasi	00 - 00	1	1	Maximize	Time Efficiency	0	12	100
129	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2489	CCL	001	Layanan Sarana Sistem Informasi Inspektorat	23.962.000	0	N	1	Unit	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
130	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2488	EBA	001	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	554.994.000	202.107.460	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
131	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2487	EBA	001	Layanan Hukum Bidang Ekonomi Makro, Fiskal PNB, Pengembangan Usaha BUMN, ESDM, Hilirisasi Pertanian, Perniagaan, Industri, Investasi, Sekretariat Kementerian, dan Inspektorat	556.373.000	77.473.130	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100



NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
132	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	WA	6919	EBA	001	Layanan Ketatausahaan dan Kearsipan	212.508.000	100.616.586	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
133	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	4538	EBA	001	Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	335.667.000	279.126.173	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
134	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	WA	6919	EBA	002	Layanan Persidangan	96.543.000	44.843.355	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
135	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	4538	EBA	002	Layanan Penyiapan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	340.305.000	149.441.250	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
136	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2487	EBA	002	Layanan Hukum Bidang Ekonomi Digital, Fiskal Pajak, Ketenagakerjaan, Kerja Sama Ekonomi, Pariwisata, Pengembangan Kawasan Ekonomi, dan Proyek Strategis	551.974.000	88.581.002	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
137	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	WA	6919	EBA	003	Layanan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Aset	585.796.000	237.104.591	N	2	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
138	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	WA	6919	EBA	004	Layanan Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	575.923.000	95.908.894	N	2	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
139	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2488	EBA	959	Layanan Protokoler	995.574.000	637.511.409	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
140	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2487	EBA	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	546.474.000	140.691.310	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
141	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2488	EBA	962	Layanan Umum	577.771.000	263.780.468	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
142	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2486	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	4.027.900.000	1.429.428.962	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
143	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	WA	6919	EBA	994	Layanan Perkantoran	56.052.806.000	30.068.727.260	N	2	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
144	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2488	EBA	994	Layanan Perkantoran	219.924.433.000	109.004.651.481	N	3	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
145	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2488	EBB	951	Layanan Sarana Internal	7.484.873.000	7.230.871.548	N	37	Paket	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
146	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	019	6	WA	6919	EBB	951	Layanan Sarana Internal	1.500.000.000	1.489.180.508	N	1	Paket	1	100	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	1	100	100
147	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2488	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	2.699.981.000	573.393.478	N	750	Orang	375	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	375	49.98	100
148	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2487	EBD	001	Layanan Reformasi Birokrasi	551.479.000	106.569.515	N	1	Layanan	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
149	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2486	EBD	001	Layanan Fasilitas Penguatan Kinerja	1.656.748.000	823.635.048	N	6	Dokumen	0	51.99	terkonfirmasi	00 - 00	1	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
150	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2486	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	873.174.000	255.089.500	N	7	Dokumen	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
151	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2488	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	318.700.000	169.926.100	N	1	Dokumen	0	49.98	terkonfirmasi	00 - VALID	1	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100
152	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	019	6	WA	2489	EBD	965	Layanan Audit Internal	743.222.000	318.760.471	N	10	Dokumen	0	49.98	terkonfirmasi	00 - 00	1	1	Maximize	Time Efficiency	0	49.98	100



NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
Total Nilai Jumlah Output																									15.200 152

Lampiran XIV Capaian Output Program Prioritas Nasional

No	Satker	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Proyek Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Kode Prioritas Nasional	Belanja			Satuan Output Strategis	Capaian Output		
									Pagu	Realisasi	%		Target Volume	Realisasi Volume	Persentase Realisasi Capaian
1	427752	2491	PBA001	Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030	Pengembangan Digitalisasi Perdagangan	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Ekonomi Digital	2	2.339.701.000	1.154.815.064	49,36%	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0
2	427752	2513	PBA001	Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Keanggotaan OECD	Penilaian Mandiri, Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD	Proses Akses Indonesia ke OECD	Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	2	6.694.514.000	204.519.562	3,06%	Rekomendasi Kebijakan	3	0	0
3	427752	4541	PBA001	Rekomendasi Kebijakan yang terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Ekonomi Digital	2	841.854.000	292.078.457	34,69%	Rekomendasi Kebijakan	2	0	0
SUBTOTAL PN 2									9.876.069.000	1.651.413.083	16,72%		6	0	0
4	427752	4539	PBA001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	Literasi dan Edukasi Keuangan	Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	Pendalaman Sektor Keuangan	3	1.503.209.000	764.610.563	50,87%	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0
SUBTOTAL PN 3									1.503.209.000	764.610.563	50,87%		1	0	0
5	427752	4545	PBK001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	4	817.663.000	293.152.096	35,85%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
6	427752	4545	PBK002	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Iklim Ketenagakerjaan yang Mendukung Pasar Kerja Fleksibel, Responsif Gender dan Inklusif	Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	4	1.105.353.000	226.548.284	20,50%	Rekomendasi Kebijakan	3	1	33%
7	427752	4550	PBK001	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	Iklim Ketenagakerjaan yang Mendukung Pasar Kerja Fleksibel, Responsif Gender dan Inklusif	Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	4	3.148.053.000	1.065.086.069	33,83%	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0
SUBTOTAL PN 4									5.071.069.000	1.584.786.449	31,25%		5	2	40%
8	427752	2500	PBA001	Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional	Tata Kelola Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Logistik	Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone, dan Sarana Penunjang Logistik	Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	5	1.497.852.000	708.508.360	47,30%	Rekomendasi Kebijakan	4	2	50%
9	427752	2519	PBK002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	Pengembangan Sustainable Textile dan Tekstil Budaya Lokal	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	5	866.085.000	493.152.849	56,94%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
10	427752	5266	PBF001	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	Penyusunan Informasi Investasi Proyek Prioritas Strategis pada Sektor-Sektor dan Proyek Transformasi Ekonomi	Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi	Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	5	9.697.252.000	4.737.734.655	48,86%	Rekomendasi Kebijakan	2	1	50%
11	427755	6922	PBP001	Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe	Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)	Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	5	319.868.000	36.426.816	11,39%	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0
12	427755	6922	PBP002	Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Galang Batang	Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)	Pengembangan KEK Galang Batang	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	5	318.689.000	49.196.210	15,44%	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0

13	427755	6922	PBP003	Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Gresik	Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)	Pengembangan KEK Gresik	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	5	318.717.000	122.982.863	38,59%	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0
14	427755	6922	PBP004	Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Sei Mangke	Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)	Pengembangan KEK Sei Mangke	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	5	313.892.000	1.758.500	0,56%	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0
15	427755	6923	QAH001	Pelayanan Investasi Administrator KEK Sei Mangke	Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)	Pengembangan KEK Sei Mangke	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	5	433.803.000	130.342.598	30,05%	Layanan	1	0	0
16	427755	6923	QAH002	Pelayanan Investasi Administrator KEK Galang Batang	Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)	Pengembangan KEK Galang Batang	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	5	512.538.000	87.940.044	17,16%	Layanan	1	0	0
17	427755	6923	QAH003	Pelayanan Investasi Administrator KEK Gresik	Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)	Pengembangan KEK Gresik	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	5	496.368.000	155.621.608	31,35%	Layanan	1	0	0
18	427755	6923	QAH004	Pelayanan Investasi Administrator KEK Arun Lhokseumawe	Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK)	Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	5	537.414.000	70.312.639	13,08%	Layanan	1	0	0
19	427752	7702	PBK001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	Penyiapan Rantai Pasok Industri Semikonduktor	Pembangunan Industri Semikonduktor	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	5	856.972.000	117.282.080	13,69%	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0
20	427752	7702	PBK002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	Optimalisasi Penerapan Standardisasi di Industri Logam Dasar	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi, dan Baja	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	5	602.044.000	165.769.614	27,53%	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0
SUBTOTAL PN 5									16.771.494.000	6.877.028.836	41,00%		17	4	24%
21	427752	4542	PBA001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	Pengendalian Inflasi	7	925.740.000	362.622.776	39,17%	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0
SUBTOTAL PN 7									925.740.000	362.622.776	39,17%		1	0	0
TOTAL									34.147.581.000	11.240.461.707	32,92%		28	6	21%

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat
Kode Pos 10710
Telp : (021) 3522003
Fax : (021) 3511467
Web : www.ekon.go.id

